

**STRATEGI OPTIMALISASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA
MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan
Kabupaten Lampung Utara)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh

Rosfa Nur Azizah

1351010191

Program Study : Ekonomi Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1438 H / 2017 M**

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosfa Nur Azizah

NPM : 1351010191

Prodi : Ekonomi Islam

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung,.....
Penyusun

Rosfa Nur Azizah
NPM. 1351010191

**STRATEGI OPTIMALISASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA
MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Pembimbing I : Hanif, S.E., M.M

Pembimbing II : Madnasir, S.E., M.Si

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1438 H / 2017 M**

ABSTRAK

Pembangunan desa merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional. Berhasilnya pembangunan nasional termasuk pembangunan desa, ditentukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan di tingkat Provinsi hingga Desa. Kondisi Desa Candimas masih memerlukan perbaikan infrastruktur guna memperlancar akses dalam bidang sosial dan ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan menggunakan dana yang bersumber dari ADD yang di terima sebesar Rp. 747.233.895, yang dialokasikan 70% untuk pembangunan dan perbaikan di berbagai aspek sarana dan prasarana dan 30% digunakan untuk operasional desa. Melihat kondisi infrastruktur yang buruk aparat desa melakukan musyawarah internal aparat desa untuk mendata apa saja yang perlu di lakukan pembangunan dan di putuskannya enam program pembangunan antara lain pembuatan sumur bor, talut penahan tanah, drainase, gorong-rorong, rabat beton, dan jalan lapen. Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan islam telah memiliki paradigma yang holistik dan strategis.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana strategi optimalisasi pembangunan infrastruktur desa melalui program ADD pada Desa Candimas Kabupaten Lampung Utara? Bagaimana pandangan ekonomi islam tentang pembangunan infrastruktur desa terhadap perekonomian masyarakat Desa Candimas Kabupaten Lampung Utara?. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui optimalisasi pembangunan infrastruktur desa melalui program ADD pada Desa Candimas Kabupaten Lampung Utara? Untuk mengetahui pandangan ekonomi islam tentang pembangunan infrastruktur desa terhadap perekonomian masyarakat Desa Candimas Kabupaten Lampung Utara?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dan penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan data primer diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui *editing, organizing, analyzing*.

Berdasarkan hasil analisis, dari penelitian penulis adalah pembangunan infrastruktur yang dilakukan kurang optimalisasi, Hal ini di lihat dari keenam program pembangunan yang dilakukan terdapat satu program saja yang berjalan optimal yaitu program pembuatan jalan lapen. Sedangkan lima program seperti pembuatan sumur bor, talut penahan tanah, drainase, gorong-gorong dan rabat beton tidak optimal dikarenakan anggaran biaya yang di dikeluarkan oleh aparat desa dengan harga menurut lkkp sangat jauh selisih biaya yang di anggarkan. Selain itu pandangan ekonomi Islam tentang pembangunan infrastruktur desa terhadap perekonomian masyarakat memberikan dampak yang Positif karena memberikan *kemaslahatan* bagi masyarakat setempat baik dari aspek ekonomi maupun aspek sosial.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Sekretariat : Jl. Letkol Endro Suratmin, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Sukarame, Bandar

Lampung

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : STRATEGI OPTIMALISASI PEMBANGUNAN DESA
MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM**

Nama : Rosfa Nur Azizah
NPM : 1351010191
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Hanif, S.E., M.M
NIP. 19740823 200003 1 001

Madnasir, S.E., M.Si
NIP. 19750424 200212 2 009

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Madnasir, S.E., M.Si
NIP. 19750424 200212 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Sekretariat : Jl. Letkol Endro Suratmin, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Sukarame, Bandar
Lampung*

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **STRATEGI OPTIMALISASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)**, disusun oleh **Rosfa Nur Azizah, 1351010191**, Jurusan Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari / tanggal: Rabu / 21 Juni 2017.

TIM MUNAQSAH

Ketua	: Ahmad Habibi, S.E., M.E.	(.....)
Sekretaris	: Suhendar, M.S.Ak.	(.....)
Penguji I	: Budimansyah, M.Kom.I.	(.....)
Penguji II	: Hanif, S.E., M.M.	(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Moh. Baharuddin, M. A

NIP. 19580824 198903 1 003

MOTTO

لَهُر مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ تَحْفَظُونَهُ ۖ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ ۚ

دُونِهِ ۚ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾



Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada perlindungan bagi mereka selain Dia.¹

¹ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahnya Q.S: Ar-Ra'd (13) ayat 11, PT Syaamil Cipta Media, Bandung, 2005, h. 370.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Ayahanda Fauzi dan Ibunda Rosmala Dewi, yang senantiasa dan tidak henti-hentinya memberikan do'a, semangat dan dukungan kepada penulis dan selalu menantikan kesuksesanku.
2. Adinda-adinda saya Defa Diena Rahmah, (Alm) Rozi Ahmad Fathoni, yang selalu senantiasa memberikan semangat dan menghiburku dalam menyelesaikan tugas Akhir.
3. Teman-teman angkatan tahun 2013 khususnya Ekonomi Islam kelas B dan teman-teman KKN 2016 kelompok 76 Desa Setya Bakti yang telah memberikan semangat, membantu, berbagi keceriaan selama kuliah.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang saya banggakan dan yang telah memberikan pengalaman yang begitu berharga.

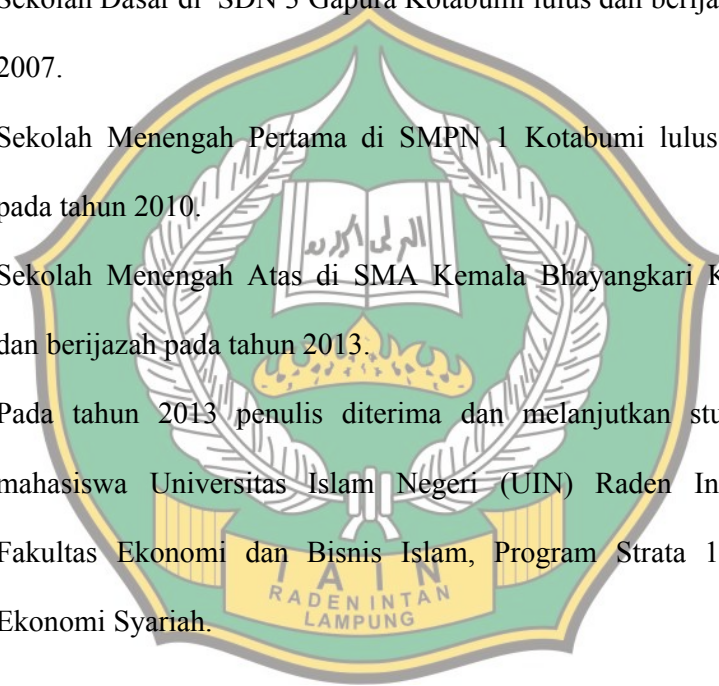


RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kotabumi, 13 April 1995 dan dianugerahi sebuah nama oleh ayahanda Fauzi dan ibunda Rosmala Dewi yaitu Rosfa Nur Azizah. Anak pertama dari tiga bersaudara.

Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah:

1. Sekolah Dasar di SDN 3 Gapura Kotabumi lulus dan berijazah tahun pada 2007.
2. Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Kotabumi lulus dan berijazah pada tahun 2010.
3. Sekolah Menengah Atas di SMA Kemala Bhayangkari Kotabumi lulus dan berijazah pada tahun 2013.
4. Pada tahun 2013 penulis diterima dan melanjutkan studinya sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Strata 1 (S1) Jurusan Ekonomi Syariah.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah serta tuntunan-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca pada umumnya.

Selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis mengalami rintangan dan mendapat bantuan secara moril maupun materil dari semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Moh. Baharuddin, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Aparatur pemerintahan Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten ampung Utara.
3. Bapak Madnasir, S.E.,M.Si selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah yang memberikan dukungan kepada penulis.
4. Bapak Hanif, S.E.,M.M selaku pembimbing I dan Bapak Madnasir, S.E.,M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu,

serta pikiran dalam membimbing, mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

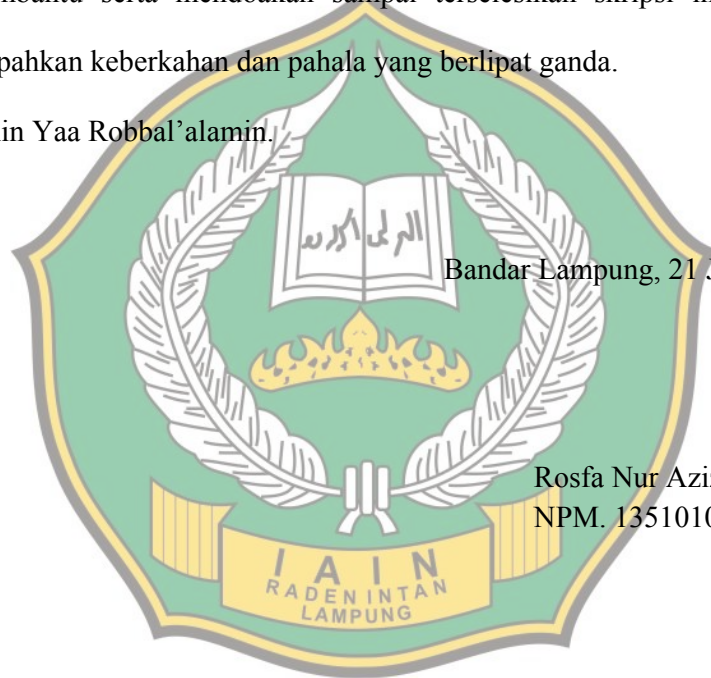
5. Para staf akademik dan kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Kepada seluruh staf akademik dan pegawai perpustakaan yang memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data, dan lain-lain.
8. Sahabat-sahabatku Diah Yusika, A.Md, Siti Nur Aini, Pipit Dwisetyowati, Rika Pharamita, Wanda Maharani Sirait, Ayu Martianingsih, Dwi Puspita Sari, S.E yang selalu memberikan semangat, berbagi keceriaan suku maupun duka, serta saling memotivasi dalam menyelesaikan tugas akhir.
9. Seluruh sahabat seperjuangan rekan Ekonomi Islam kelas A-F 2013, khususnya kelas B 2013 yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan teman-teman KKN 2016 kelompok 76 desa setia bakti, dan rekan mahasiswa yang ikut membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, kemampuan yang peneliti miliki. Untuk itu para pembaca kiranya dapat

memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini. Peneliti berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Khususnya ilmu-ilmu keislaman di abad modern ini.

Akhirnya, dengan iringan doa dan ucapan terima kasih penulis, semoga jerih payah dan jasa-jasa bapak ibu semua serta pihak-pihak yang telah membantu serta mendoakan sampai terselesaikan skripsi ini, Allah SWT limpahkan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda.

Amin Yaa Robbal'alamin.



Bandar Lampung, 21 Juni 2017

Rosfa Nur Azizah
NPM. 1351010191

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	i v
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Batasan Masalah	10
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
G. Metode Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembangunan Desa	20
1. Pengertian Desa	20
a. Karakteristik Pedesaan	22
b. Tipologi Desa	23
c. Pemerintahan Desa	27
2. Dasar-dasar Pembangunan Desa	29
3. Otonomi Desa	31
4. Perencanaan Pembangunan Desa	34
5. Pembangunan Desa dalam Manajemen Pembangunan Daerah	39
B. Konsep Pembangunan dalam Islam	41
1. Pengertian Pembangunan dalam Islam	41

C. Pemberdayaan Masyarakat	43
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	43
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	48
3. Indikator Pemberdayaan Masyarakat	49
4. Strategi Pemberdayaan	51
5. Pemberdayaan Dalam Islam	52
6. Sasaran Pemberdayaan	56
7. Perencanaan Program	56
D. Alokasi Dana Desa	58
1. Pengertian Alokasi Dana Desa	58
2. Penetapan Alokasi Dana Desa	59
3. Penggunaan Alokasi Dana Desa	60
4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa	61
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	65
A. Gambaran Umum Tentang Desa Candimas	65
1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Candimas	65
2. Kondisi Geografi Desa Candimas	65
3. Tata Pemerintahan Desa Candimas	66
4. Kondisi Demografi Desa Candimas	67
a. Jumlah Penduduk	67
B. Pembangunan Infrastruktur desa Candimas	67
1. Jenis-jenis Pembangunan Infrastruktur Desa Candimas	67
2. Pemberdayaan yang di Lakukan Pada Desa Candimas	74
BAB IV ANALISIS DATA	81
A. Strategi optimalisasi pembangunan infrastruktur desa melalui program pemberdayaan masyarakat Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara	81
B. Pandangan ekonomi islam tentang pembangunan infrastruktur terhadap perekonomian masyarakat Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	93
A. KESIMPULAN	93
B. SARAN	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Penduduk Desa Candimas	67
1.2 Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016	68
1.3 Data Program ADD Desa Candimas	69
1.4 Biaya Pembangunan Infrastruktur Di Pasaran Per Meter	80
1.5 Data Perbandingan Harga	85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam proposal judul ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca yang tertuang dalam penegasan judul. Oleh karena itu diperlukannya pembatasan arti kalimat dalam penulisan skripsi ini, dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang di maksud.

Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul, **“STRATEGI OPTIMALISASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Desa Candimas Kabupaten Lampung Utara)”**. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

Strategi berasal dari bahasa Inggris *“strategy”* yang berarti ilmu siasat (perang), akal.¹ Strategi adalah proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengendalian berbagai keputusan dan tindakan strategis dengan tujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif.²

Optimalisasi adalah kondisi terbaik yang memiliki penuh harapan.³

¹ John M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Gramedia: Jakarta, 1990), h. 56.

² Ismail solihin, *Manajemen Startegi*, (Penerbit Erlangga: Jakarta, 2012), h. 64.

³ Hasan Alwi dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depertemen Pendidikan Nasional, , Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 801.

Pembangunan adalah mendirikan (mengadakan gedung/ bangunan, jalan dan lain-lainnya).⁴ Pembangunan mengandung arti suatu proses yang menyebabkan sesuatu dapat tumbuh, atau menjadi lebih matang atau desa, lebih maju atau lebih terorganisasi.⁵

infrastruktur adalah prasarana yang merupakan pelayanan kepada masyarakat dalam skala besar seperti air, jalan raya, kereta api, komunikasi dan lain-lain.⁶

Desa menurut undang-undang No. 5 tahun 1979 desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang di dalamnya merupakan kesatuan hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah di bawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan.⁷ Program dibuat agar rancangan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Pemberdayaan masyarakat adalah membuat komunitas lokal memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumberdaya mereka, mereka dibuat agar memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengajar

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-3, (Balai Pustaka: Jakarta, 2007), h. 103

⁵ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.77.

⁶ Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, *kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.162.

⁷ *Ibid*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 897.

pelaksanaan atau implementasi inisiatif itu dengan kemampuan sendiri⁸. Pemberdayaan masyarakat proses pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan obyektif dan alasan subyektif adalah sebagai berikut:

1. Secara Objektif

Peneliti tertarik dengan permasalahan ini dikarenakan pembangunan desa yang menggunakan program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, namun tidak melibatkan peran dan kontribusi masyarakat di dalam kegiatannya.

Maka dari itu peneliti tertarik meneliti permasalahan ini untuk melihat bagaimana dampak pembangunan desa yang tidak melibatkan masyarakatnya untuk berperan dan memberikan kontribusi bagi pembangunan desa. Pada kawasan Desa Candimas memungkinkan untuk diadakan penelitian. Aspek yang peneliti akan bahas adalah permasalahannya cukup memungkinkan diadakan penelitian mengingat literatur dan bahan data informasi yang diperlukan cukup menunjang dan

⁸ Mira Agustina, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Islam Melalui Praktek Kerjasama Musaqqoh", (Skripsi Program Strata 1 IAIN, Lampung, 2012), h.1.

relevan dengan ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Secara Subjektif

Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis, mengingat adanya ketersediaan bahan literatur yang cukup memadai serta data dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian baik data sekunder dan data primer memiliki kemudahan akses serta akses letak objek penelitian mudah dijangkau oleh penulis.

C. Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional. Berhasilnya pembangunan nasional termasuk pembangunan desa, ditentukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

Dalam UU RI Nomor 22 Tahun 1999, desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.⁹ Dalam Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No.4 Tahun 2014 dikatakan Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan

⁹ Nurman, *Srtategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 233.

kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.¹⁰

Pembangunan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia seutuhnya.¹¹ Selain itu untuk mencapai tujuannya pembangunan yang berpusat pada rakyat mengharuskan desentralisasi yang cukup besar dalam proses pembuatan keputusan.¹²

Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sistem pembangunan prasarana desa harus berbuah dari cara yang selama ini dilakukan di desa.¹³ Dalam upaya pembangunan desa, peraturan pemerintah No.72 Tahun 2005 menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari : (1) pendapatan asli daerah, (2) bagi hasil pajak dan hasil retribusi daerah kabupaten/kota, (3) dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, (4) bantuan keuangan dari pemerintah, (5) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan sumbangan lainnya yang dianggap sah.¹⁴

Upaya pembangunan desa yang menggunakan Alokasi Dana Desa maka pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa ini dapat

¹⁰ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹¹ Rosnawati, "Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kab. Way Kanan Dalam Perspektif Islam", (Skripsi Program Strata 1 IAIN, Lampung, 2015), h. 3.

¹² D.C. Korten dan Sjahrir, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), h. 375.

¹³ Kementrian Desa, *Pembangunan Daerah Ertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Membangun Sarana Dan Prasarana Desa*, 2015, h. 9.

¹⁴ Adianto dan dkk, "Strategi Pembangunan Desa Melalui Program Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Logas Tanah Daratan Kabupaten Kuantas Singingi", *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, (Vol 4, No 1, Januari-Juni 2013), h. 2-3.

mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Dana Alokasi Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat harus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datanya dana bantuan dari pemerintah pusat.

Parsons mengemukakan Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian yang mempengaruhi kehidupan. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.¹⁵ Indikator pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif.¹⁶

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat (masyarakat umum, masyarakat kurang mampu) dan unsur pemerintahan yang memang menggunakan kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran. Pembangunan desa dengan pemberdayaan masyarakat langsung memiliki hasil yang lebih efektif dan efisiensi dibandingkan dengan pembangunan desa dengan menggunakan tenaga proyek ataupun pekerja dari desa lain. Salah satu pola

¹⁵ Edi suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Refika Aditama: Bandung, 2014), h. 58-59.

¹⁶ *Ibid*, Edi Suharto, h. 63.

pendekatan pemberdayaan masyarakat paling efektif dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat adalah merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan bekerja secara kooperatif dan menumbuhkan rasa gotong royong sesama warga desa.

Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan islam telah memiliki paradigma yang holistik dan strategis.¹⁷ Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam islam perlunya di terapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidupnya ke yang lebih baik. Dalam agama Islam memiliki konsep pemberdayaan masyarakat dalam kitab suci yaitu Al-qur'an Q.S Ar-Ra'd ayat 11:

لَهُ مَعْقَبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga

¹⁷ Mutthoriq dkk, "Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir", Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 2, No 3, h. 1 426-432.

*mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.*¹⁸

Berdasarkan ayat At-Ra'd ayat 11 yang menyebutkan bahwa Tuhan tidak akan merubah Keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka. Sehingga dengan mereka dapat mengelola dan membentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya pula dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tengah gencar-gencarnya melakukan pembangunan di desa-desa untuk meningkatkan infrastruktur yang telah diprogramkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan di seluruh desa yang berada di lampung utara untuk meningkatkan mutu dan kualitas pada sarana dan prasarana pada setiap desa yang ada.

Pembangunan yang dilakukan di Lampung Utara yaitu salah satunya berada di Desa Candimas, Desa Candimas merupakan salah satu desa yang perlu adanya pembangunan infrastruktur diberbagai bidang, karena dilihat dari segi kondisi jalan dan kelengkapan lainnya masih mengalami kondisi yang memprihatinkan. Desa Candimas juga merupakan desa swasembada

¹⁸ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahnya Q.S: Ar-Ra'd (13) ayat 11, PT Syaamil Cipta Media, Bandung, 2005, hlm. 368.

yang mana memiliki kemandirian lebih tinggi, mata pencaharian sebagian besar masyarakatnya di bidang jasa, dan tidak mengikat pada adat istiadat yang kental, selain itu adanya kelebihan dalam berbagai bidang baik dalam bidang ekonomi ataupun sosial. Meskipun telah menjadi desa swasembada Desa Candimas masih memerlukan perbaikan infrastruktur dibidang sarana dan prasarana untuk memperlancar berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Candimas.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Lampung Utara pada Desa Candimas dana yang bersumber berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD). Dana desa yang diterima oleh Desa Candimas sebesar Rp. 747.233.895 dengan 70% dananya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan melihat dari apa saja yang perlu dilakukannya pembangunan dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Pada pembangunan infrastruktur di Desa Candimas dalam penentuan program pembangunan yang akan dilakukan, pihak aparatur desa melakukan rapat internal dengan aparatur desa.¹⁹ Karena pihak aparatur desa melihat dan merasakan sendiri apa saja yang menjadi kekurangan dari infrastruktur yang ada di desa, oleh sebab itu aparatur desa merasa pendapat mereka telah mewakili apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, seperti kondisi jalan yang buruk seperti berbatu, berlubang, tergenang air, tanah yang licin di saat hujan karna tekstur tanah merah, tanah yang mudah terbawa air, sulitnya air disaat kemarau karena kekeringan, menjadi hal utama yang membuat aparatur

¹⁹ Abi, Wawancara (Riset) dengan Kaur Pembangunan Desa Candimas, Kantor Kelurahan Candimas, Abung Selatan, 17 Februari 2017.

desa memilih diadakan pembangunan antara lain pembuatan sumur bor, talut penahan tanah, drainase, gorong-gorong, jalan lapen, dan rabat beton. Dari keenam program pembangunan yang akan di lakukan program tersebut saling berkaitan untuk hal ini dilakukan agar pembangunan yang dilakukan dapat dirasakan oleh masyarakat, baik dari kelancaran lalu lintas, dapat merangsang perekonomian yang ada didesa, ketersediaan air yang memadai, dan menyediakan infrastruktur yang baik pada Desa Candimas.²⁰

Dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Desa Candimas dalam pengerjaannya tidak melibatkan peran dan kontribusi masyarakat didalamnya, melainkan menggunakan tenaga pekerja dari luar desa.²¹ Dilihat dari mata pencaharian warga desa candimas yang sebagian besarnya bekerja sebagai pekerja bangunan atau buruh harian, dapat di pastikan bahwa mereka cukup profesional dalam pengerjan pembangunan yang dilakukan tersebut.²² Mengingat pentingnya keterlibatan warga dalam pembangunan yang ada di desa menjadi faktor utama dalam pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan dan rasa tanggung jawab terhadap pembangunan yang di lakukan di desa mereka.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merasa tertarik melakukan penelitian lapangan yang berjudul **“Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Candimas Kabupaten Lampung Utara)”**.

²⁰ Husin Akbar, Wawancara (Riset) dengan Sekretaris Desa Candimas, Kantor Kelurahan Candimas, Abung Selatan, 17 Februari 2017.

²¹ Fauzan Yusuf, Wawancara (Riset) dengan Warga Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, 17 Februari 2017.

²² Di Lihat Pada Bagian Lampiran.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, dan mengingat luasnya pembahasan yang akan dilakukan, maka penulis perlu membatasi masalah yang akan diteliti pada:

1. Pembangunan infrastruktur pada Desa Candimas yang menggunakan program alokasi dana desa .
2. Penelitian ini berfokus pembangunan infrastruktur Desa candimas pada tahun 2016.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya pada latar belakang masalah, maka masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana strategi optimalisasi pembangunan infrastruktur desa melalui program alokasi dana desa pada Desa Candimas Kabupaten Lampung Utara ?
2. Bagaimana pandangan ekonomi islam tentang pembangunan infrastruktur desa terhadap perekonomian masyarakat Desa Candimas Kabupaten Lampung Utara ?

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berawal dari pokok permasalahan di atas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan dan kegunaan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam melaksanakan penelitian tersebut.

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui optimalisasi pembangunan infrastruktur desa melalui program alokasi dana desa pada Desa Candimas Kabupaten Lampung Utara ?
- b. Untuk mengetahui pandangan ekonomi islam tentang pembangunan infrastruktur desa terhadap perekonomian masyarakat Desa Candimas Kabupaten Lampung Utara ?

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Secara Teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan-pemmasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, diharapkan akan memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai strategi optimalisasi pembangunan infrastruktur desa melalui program pemberdayaan masyarakat yang tidak melibatkan masyarakat di dalamnya. Secara teoritis manfaat penulisan akan membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan sekaligus rujukan terutama dalam studi pada Desa candimas Kabupaten Lampung Utara.

b. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan mahasiswa dan lapisan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu Ekonomi Islam di setiap perguruan tinggi

di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan menjadi kontribusi pemikiran ilmiah bagi yang berkaitan dengan ilmu Ekonomi Islam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²³ Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.²⁴

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Penelitian bersifat kualitatif ini hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁵ Dilihat dari jenisnya (menurut tempat dilaksanakannya penelitian), penelitian ini termasuk

²³ Sugino, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 2.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Metodelogi penelitian*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2006, h. 112.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta: Bandung, 2012), h. 9.

penelitian lapangan atau *Field research* yaitu penelitian dalam kanca kehidupan yang sebenarnya.²⁶ Penelitian *field research* dikerjakan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian berkenaan dengan strategi optimalisasi pembangunan desa melalui program pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang tidak melibatkan masyarakat di dalamnya.

Selain menggunakan *field research* penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dalam ruang lingkup kepustakaan.²⁷ Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literature yang berhubungan langsung dan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

b. Sifat Penelitian

Di lihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi peneliti juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya.²⁸ Dengan mengumpulkan data-data dari lapangan yang berupa wawancara dan catatan hasil penelitian dilapangan.

²⁶ Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002), h. 142.

²⁷ *Ibid.* Hadi Sutrisno h. 144.

²⁸ Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, (Jakarta: STIA-LAN, 1998), h. 60.

2. Sumber Data

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh sendiri oleh organisasi atau perorangan langsung dari objeknya.²⁹

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan, yaitu dari para masyarakat setempat di Desa Candimas Kabupaten Lampung Utara. Data ini merupakan data utama yang penulis gunakan untuk mencari informasi mengenai strategi optimalisasi pembangunan infrastruktur desa melalui program alokasi dana desa pada Desa Candimas Lampung Utara.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi-publikasi.³⁰ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku literatur dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah. Data yang diperoleh dari lembaga ataupun instansi yaitu dari Dinas Badan Perencanaan Kabupaten Lampung Utara, Kantor Kelurahan Candimas.

²⁹ Benyamin Lakitan dkk, *Metodologi Penelitian*, (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 1998), h. 77.

³⁰ *Ibid*, metodologi penelitian, h. 77.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakkan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.³¹ Pencatatan data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga menadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat.³² Untuk mengamati kejadian yang komplek dapat menggunakan alat bantu misalnya seperti kamera, video tape, dan audio tape recorder.³³

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung pada Desa Candimas Lampung Utara, untuk mengamati objek penelitian secara langsung dan lebih mendalam guna mendapatkan informasi.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung engan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakana berhadapan langsung antara interviewer(s) dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.³⁴

³¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya (cetakan kelima), (2006), h. 63.

³² Suharini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm.229.

³³ *Ibid*, Suharsini Arikunto, h. 230.

³⁴ *Op., Cit*, Joko Subagyo, h. 39.

Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu proses wawancara dimana peneliti bertanya kepada responden, kemudian responden menjawab secara bebas. Tujuannya agar mendapatkan informasi yang valid, menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari objek penelitian. Yang akan di wawancara dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Candimas Lampung Utara, dan para aparatur desa yang bertanggung jawab atas penanganan pembangunan desa.

c. Dokumentasi

Tidak kalah penting dari metode-metode lain. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Data ini cenderung kepada data sekunder.³⁵ Berdasarkan pengertian tersebut maka dengan ini penulis menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data tentang pembangunan infrastruktur desa Candimas Lampung Utara dari aparatur desa yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur seperti Kepala Desa, dan Kaur Pembangunan.

4. Pengolahan Data dan Analisis

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis digunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik untuk menggambarkan

³⁵ *Ibid*, Suharsini Arikunto, h. 202.

atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan, dimana teknik ini menggambarkan tentang strategi optimalisasi pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Editing

Editing data merupakan proses dimana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. Proses klarifikasi menyangkut memberikan penjelasan mengenai apakah data yang sudah terkumpul akan menciptakan masalah konseptual atau teknis pada saat peneliti melakukan analisis data. Dengan adanya klarifikasi diharapkan masalah teknis atau konseptual tidak mengganggu proses analisis sehingga dapat menimbulkan bias penafsiran hasil analisis.³⁶

b. Organizing

Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.³⁷

Teknik ini merupakan langkah yang dilakukan setelah melakukan setelah *editing*, karena dapat memudahkan peneliti untuk memahami tentang permasalahan yang ada pada Desa Candimas Lampung Utara. Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat

³⁶ Jhonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 135.

³⁷ *Ibid*, Jhonatan Sarwono, h. 154.

memperoleh gambaran tentang Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Candimas Lampung Utara.

c. *Analyzing*

Dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian dengan menggunakan teori sehingga diperoleh kesimpulan.³⁸

Kesimpulan yang disimpulkan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara.³⁹

Menurut penulis *analizing* yaitu berawal dari data-data yang masih bersifat samar-samar dan semu, kemudian bila diteliti lebih lanjut akan semakin jelas karena data yang diperoleh dan hasilnya pun akan lebih sempurna, pada teknik ini peneliti akan menganalisis Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Candimas Lampung Utara.

³⁸ *Ibid*, Jhonatan Sarwono, h. 195.

³⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: CV Alfa Beta, 1998), h. 300.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembangunan Desa

1. Pengertian Desa

Istilah desa berasal dari bahasa india *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa dan pedesaan sering dikaitkan dengan pengertian *rural* dan *village* yang dibandingkan dengan kota (city/town) dan perkotaan (urban). Konsep pedesaan dan perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu wilayah administrasi atau tutorial, dalam hal ini pedesaan mencakup beberapa desa. Definisi tentang desa sendiri sampai sekarang belum dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang di kalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah satu dengan daerah lain yang berbeda budayanya. Beberapa para ahli atau pakar mengemukakan pendapatnya dari tinjauannya masing-masing.⁴⁰

Bintarto yang memandang desa dari aspek geografis mendefinisikan desa sebagai “suatu hasil perwujudan antara kegiatan sekelompok orang manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu

⁴⁰ Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 226.

wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomi, politisi, dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.”

Kuntjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap disuatu daerah, sedangkan Bargel mendefinisikan desa sebagai setiap pemukiman para petani. Landis menguraikan pengertian desa dalam tiga aspek, yaitu:

- a. Analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduk kurang dari 2.500.
- b. Analisis sosial psikologis, desa merupakan suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan akrab dan bersifat informal di antara sesama warganya.
- c. Analisis ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduknya tergantung kepada pertanian.⁴¹

Dalam peraturan pemerintah RI (PP) Nomor 76/2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dinyatakan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 18 Undang-undang Dasar 1945. Dalam Bab I, ketentuan umum, Pasal I, dinyatakan bahwa “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat

⁴¹ *Ibid*, Nurman, h. 226-227.

hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten”.⁴²

a. Karakteristik Pedesaan

Dalam beberapa kajian dibedakan antara masyarakat kota dan desa berdasarkan letak geografis kebiasaan dan karakteristik keduanya. Menurut Roucek dan Warren, masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Peranan kelompok primer sangat besar.
- 2) Faktor geografis sangat menentukan pembentukan kelompok masyarakat.
- 3) Hubungan lebih bersifat intim dan awet.
- 4) Struktur masyarakat bersifat homogen.
- 5) Tingkat mobilitas sosial rendah.
- 6) Keluarga lebih ditekankan kepada fungsi sebagai unit ekonomi.
- 7) Proporsi jumlah anak cukup besar dalam struktur kependudukan.⁴³

Sorokoin dan Zimerman mengemukakan sejumlah faktor yang menjadi dasar dalam menentukan karakteristik kota dan desa yaitu: mata pencarian, ukuran komunitas, tingkat kepadatan penduduk, lingkungan diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, interaksi sosial dan

⁴² *Ibid*, Nurman, h. 227.

⁴³ *Ibid*, Nurman, h. 228.

kondisi geografis wilayahnya, seperti usaha tani, usaha nelayan, ternak, kerajinan tangan dan pedagang kecil. Ciri lain yang nyata terlihat, produksi pertanian yang ditekuni masyarakat terutama untuk memenuhi keperluan sendiri.⁴⁴

Secara psikologis masyarakat desa cenderung suka curiga terhadap orang luar. Namun demikian, masyarakat desa dapat bersifat hemat, cermat, dan menghormati orang lain yang terkadang sulit ditemukan di perkotaan.

b. Tipologi Desa

Tipologi desa dapat dilihat dari beberapa aspek dominan seperti mata pencaharian dan pola interaksi sosial yang terbangun. Dari mata pencaharian pokok dapat ditentukan tipe desa beserta karakteristik dasarnya.⁴⁵

Berdasarkan intruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1972 tentang Pelaksanaan Klarifikasi dan Tipologi Desa di Indonesia digolongkan dalam tiga tingkatan yakni:

1) Desa swadaya

Merupakan desa yang paling terbelakang dengan budaya kehidupan tradisional dan sangat terikat dengan adat istiadat.

Desa ini biasanya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat

⁴⁴ *Ibid*, Nurman, h. 228.

⁴⁵ *Ibid*, Nurman, h. 230.

rendah, sarana dan prasarana minim serta sangat tergantung pada alam. Secara umum ciri-ciri desa swadaya sebagai berikut.

- a) Lebih dari 50% penduduk bermata pencaharian di sektor primer (berburu, menangkap ikan dan bercocok tanam secara tradisional).
- b) Produksi desa sangat rendah di bawah 50 juta rupiah per tahun.
- c) Adat istiadat masih mengikat kuat.
- d) Pendidikan dan keterampilan rendah, kurang dari 30% yang lulus sekolah dasar.
- e) Prasarana masih sangat kurang.
- f) Kelembagaan formal dan informal kurang berfungsi dengan baik.
- g) Swadaya masyarakat masih sangat rendah sehingga kerap kali pembangunan desa menunggu intruksi dari atas.⁴⁶

2) Desa swakarsa

Merupakan desa yang mengalami perkembangan lebih maju dibandingkan desa swadaya. Desa ini telah memiliki landasan lebih kuat dan berkembang lebih baik serta lebih kosmopolit. Desa swakarsa penduduknya mulai melakukan peralihan mata pencaharian dari sektor primer ke sektor lain. Secara umum ciri-ciri desa swakarsa sebagai berikut:

⁴⁶ *Ibid*, Nurman, h. 231.

- a) Mata pencahian penduduk mulai bergeser dari sektor primer ke industri, penduduk desa mulai merupakan teknologi pada usaha taninya, kerajinan dan sektor sekunder mulai berkembang.
- b) Produksi desa masih pada tingkat sedang, yaitu 50-100 juta rupiah setiap tahun.
- c) Kelembagaan formal dan informal mulai berkembang, adat 4-6 lembaga yang hidup.
- d) Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat sedang 30-60% telah lulus SD bahkan ada beberapa yang telah lulus sekolah lanjutan.
- e) Fasilitas dan prasarana mulai ada meski tidak lengkap, paling tidak ada 4-6 sarana umum yang tersedia di masyarakat.
- f) Swadaya masyarakat dan gotong-royong dalam pembangunan desa mulai tampak meski tidak sepenuhnya.⁴⁷

3) Desa swasembada

Merupakan desa yang memiliki kemandirian lebih tinggi dalam segala bidang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Desa swasembada mulai berkembang dan maju dengan petani yang tidak terikat dengan adat istiadat atau pola tradisional. Prasarana dan sarana lengkap dengan perekonomian lebih

⁴⁷ *Ibid*, Nurman, h. 231-232.

mengarah pada industri barang dan jasa. Sektor primer dan sekunder lebih berkembang. Ciri-ciri desa swasembada sebagai berikut:

- a) Mata pencaharian penduduk sebagian besar di sektor jasa dan perdagangan.
- b) Produksi desa tinggi dengan penghasilan usah di atas 100 juta rupiah pertahun.
- c) Adat istiadat tidak mengikat lagi meskipun sebagian masyarakat masih menggunakannya.
- d) Kelembagaan formal dan informal telah berjalan sesuai dengan fungsinya dan telah hidup.
- e) Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat 60% telah lulus SD sekolah lanjutan bahkan ada beberapa yang telah lulus perguruan tinggi.
- f) Fasilitas dan prasarana mulai lengkap dan baik.
- g) Penduduk sudah memiliki inisiatif sendiri melalui swadaya dan gotong royong dalam pembangunan desa.⁴⁸

Kemajuan desa berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat. Desa yang dekat dengan kota akan memiliki kebiasaan, gaya hidup, tata nilai dan percepatan pembangunan yang berbeda dari desa yang jaraknya jauh dari kota.

⁴⁸ *Ibid*, Nurman, h. 232.

c. Pemerintahan desa

Dalam UU RI Nomor 22 tahun 1999, desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentinagn masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Penegrtian ini mengandung makna dan konsekuensi logis dalam penataan sistem pemerintahan dan birokrasi.⁴⁹ Hal-hal yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan dan birokarasi desa sebagai berikut:

- a. Landasan pemikiran dalam pengaturan tentang pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan bagian atau subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab pada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas itu kepada bupati.
- c. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat di tuntutan dan menuntut di pengadilan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai wewenang untuk melakukan

⁴⁹ *Ibid*, Nurman, h. 233.

perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

d. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legalitas dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.

e. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan. Lembaga ini bertujuan sebagai mitra pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.

f. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lainnya yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.

g. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya.⁵⁰

Dalam batang tubuh UU RI Nomor 22 Tahun 1999 desa tidak dinyatakan secara eksplisit memiliki otonomi tetapi disebutkan memiliki otonomi asli berada dalam bagian penjelasan. Hal lain menyangkut keberadaan pemerintah desa yang memposisikan pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa sebagai pemegang pemerintahan “birokrasi desa”. Kemungkinan lembaga lain yang

⁵⁰ *Ibid*, Nurman, h. 234.

telah lama diakui oleh masyarakat sulit untuk memegang peranan ini. Pemerintahan desa merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan nasional. Keberadaan pasal yang mengatur pembentukan pemerintah dan perangkat desa akan menghasilkan kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa dan BPD yang akan membatasi peran pemimpin desa dan atau lembaga perwakilan lain yang bersifat asli yang ada di desa yang bersangkutan.⁵¹

Susunan pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa (Pemdes) dan di Badan Perwakilan Desa (BPD). Pemdes dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat desa yang bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. BPD adalah badan perwakilan yang terdiri dari atas pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa (Perdes), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa.⁵²



2. Dasar-dasar Pembangunan Desa

Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa telah menjadi dua istilah yang sering di campuradukan pengertiannya. Padahal secara definisi keduanya memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Sumarja, menyebutkan bahwa pembangunan masyarakat desa (*community*

⁵¹ *Ibid*, Nurman, h. 234.

⁵² *Ibid*, Nurman, h. 237.

development) adalah usaha pembangunannya hanya diarahkan pada kualiti manusianya, sedangkan pembangunan desa (*rural development*) mengusahakan pembangunan masyarakat yang dibarengi lingkungan hidupnya.⁵³

Secara rinci Djiwadono menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi:

- a. Tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.
- b. Tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa.
- c. Tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan.
- d. Tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.⁵⁴

Dari uraian tersebut jelas sekali bahwa usaha untuk mencapai tujuan tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah kemampuan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Menurut Napitupulu bahwa sumber daya manusia merupakan masalah yang paling penting terutama dalam hal partisipasi masyarakat secara maksimal

⁵³ *Ibid*, Nurman, h. 240.

⁵⁴ *Ibid*, Nurman, h. 242.

dalam usaha-usaha pembangunan dan memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan. Kedua pengertian tersebut tidaklah perlu dibedakan dengan mutlak. Karena hakikatnya didalam pembangunan desa sudah tercakup di dalamnya pembangunan masyarakat desa.

Pada dasarnya pembangunan pedesaan bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram dan dinamis. Pembangunan masyarakat pedesaan untuk menciptakan kehidupan yang demokratis, baik dalam kegiatan dan aktivitas ekonomi, sosial budaya dan politik ternyata haruslah berbasis pada beberapa prinsip dasar latar belakang sejarah, hukum dan kemajemukan etnis, sosial, budaya, dan demokrasi, otonomi, partisipasi dan kontrol bagi warga masyarakat.⁵⁵

3. Otonomi Desa

Pelaksanaan desentralisasi akan membawa efektivitas dalam pemerintahan dan pembangunan, sebab wilayah negara itu pada umumnya terdiri dari berbagai satuan daerah yang masing-masing

⁵⁵ *Ibid*, Nurman, h. 243.

memiliki sifat khusus tersendiri seperti keadaan tanah, iklim, flora, fauna, adat istiadat, kehidupan ekonomi, dialek bahasa), tingkat pendidikan dan lainnya.

Sistem *desentralisasi* memberikan kebertanggungjawaban kepada masyarakat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, atau dengan istilah yang sudah lazim disebut dengan hak otonomi. Menurut Mariun bahwa dengan melaksanakan *desentralisasi* maka pemerintah akan demokratis. Hal ini disebabkan karena dalam negara yang menganut paham demokrasi, seharusnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyatnya untuk ikut serta dalam pemerintahan.⁵⁶

Otonomi desa dalam UU RI Nomor 22 Tahun 1999 sebagai daerah yang bersifat istimewa dan mandiri, memiliki identitas sendiri. Desa bukan merupakan unsur pelaksana administratif kabupaten dan kecamatan. Penyelenggaraan pemerintah desa dijelaskan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Gagasan otonomi desa berpijak pada semangat *good governance* dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana

⁵⁶ *Ibid*, Nurman, h. 253.

desa mengelola aset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan.⁵⁷

Prinsip utama otonomi desa adalah kewenangan membuat keputusan sendiri melalui semangat keswadayaan yang telah lama dimiliki oleh desa, dalam satu kesatuan wilayah pedesaan. Selayaknya desa dipercaya untuk mengurus dirinya dalam unit wilayah kelola desa melalui aturan yang dibuat secara mandiri. Semenjak masa lampau, ciri paling kuat pemerintahan desa tradisional di Indonesia adalah adanya peranan dana swadaya dan gotong royong. Dua ciri tersebut merupakan modal sosial yang jauh lebih penting dan potensial ketimbang modal keuangan.⁵⁸ Modal sosial sebagai potensi kemandirian dan sumber daya alam sebagai sumber pendapatan merupakan landasan berkembangnya ekonomi rakyat dan kemandirian desa guna mencapai otonomi. Mengkrucutnya kebijakan otonomi daerah menuju desa seharusnya diikuti dengan pengembangan ekonomi rakyat dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan untuk mencukupi pendapatan asli desa. Hal ini merupakan kewajiban untuk meyakinkan pemerintah agar memberi otonomi murni agar desa dapat mengurus dirinya sendiri. Sebagai bukti keberhasilan praktik pengelolaan sumber daya hutan memberi bukti otonomi desa dapat diproses melalui kehandalan sosial dan peningkatan ekonomi rumah tangga.

⁵⁷ *Ibid*, Nurman, h. 260.

⁵⁸ *Ibid*, Nurman, h. 260.

4. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. secara garis besar perencanaan desa mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan.
- b. Perencanaan pembangunan lingkungan, semua program peningkatan kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun, dan desa.
- c. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat setempat.
- d. Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran masyarakat dalam membangun masa depan.⁵⁹

Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian rakyat dalam jangka panjang. Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu menemukani kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola

⁵⁹ *Ibid*, Nurman, h. 262.

kebutuhan masyarakat dalam perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan. Secara khusus tujuan dari perencanaan desa sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
- b. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
- c. Meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas pembangunan.
- d. Menghasilkan keterpaduan antarbidang/ sektor dan kelembagaan dalam kerangka.⁶⁰

Undang-undan RI Nomor 25 Tahun 2004 telah memberikan panduan dalam menyusun perencanaan desa yang memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. **Strategis**, Perencanaan desa merupakan suatu kerangka kerja pembangunan yang komperensif dan sistematis dalam mencapai harapan yang dicita-citakan. Hasil perencanaan berupa pemikiran strategis dalam menggali gagasan dan isu-isu penting yang berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi pemerintahan desa dan masyarakat. Kebijakan strategis yang dituangkan dalam perencanaan desa merupakan arah perubahan dan orientasi pembangunan yang perlu dilakukan untuk mencapai harapan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kualitas dokumen

⁶⁰ *Ibid*, Nurman, h. 263.

perencanaan desa sangat ditentukan seberapa jauh dokumen perencanaan dapat mengungkapkan secara sistematis proses pemikiran strategis tersebut.⁶¹

b. Demokratis dan partisipasi, perencanaan desa merupakan dokumen milik bersama sebagai acuan kebijakan desa yang disusun secara partisipatif melibatkan pemangku kepentingan. Prinsip musyawarah dan partisipasi menjadi landasan dalam proses perencanaan di desa dilaksanakan secara transparan, akuntebel, dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan perencanaan, mencakup:

- 1) Identifikasi pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan dalam proses pengembalian keputusan dalam pengambilan keputusan.
- 2) Kesetaraan antara pemerintah desa dan pemangku kepentingan lain dalam pengambilan keputusan.
- 3) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan desa.
- 4) Keterwakilan dari seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok perempuan dan kelompok rentan.
- 5) Kepemilikan (*sense of ownership*) masyarakat terhadap dokumen perencanaan.
- 6) Pelibatan masih dalam sosialisasi perencanaan.

⁶¹ *Ibid*, Nurman, h. 263.

7) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti: perumusan isu pembangunan desa dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan, dan prioritas program.⁶²

c. **Politik**, rencana desa merupakan hasil kesepakatan berbagai unsur dan kekuatan politik dalam kerangka mekanisme kenegaraan yang diatur melalui undang-undang. Dengan kata lain, hasil perencanaan desa sebagai seluruh produk politik yang dalam penyusunannya melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politisi terutama kepala desa dan BPD:

- 1) Dilakukan konsultasi dengan kepala desa untuk penerjemah yang tepat dan sistematis atas visi dan misi dan program kepala desa ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan desa.
- 2) Melibatkan BPD dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa.
- 3) Beberapa pokok pemikiran BPD menjadi acuan dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa.
- 4) *Review*, saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan berkaitan terhadap rancangan dokumen desa.
- 5) Dilakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa (Perdes).

⁶²*Ibid*, Nurman, h. 264.

- 6) Pengesahan dokumen rencana pembangunan desa sebagai peraturan desa yang mengikat semua pihak untuk melaksanakannya dalam lima tahun ke depan.⁶³

d. Bottom-up Planning, perencanaan dari bawah yang dimaksud bahwa proses penyusunan rencana pembangunan desa harus memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat:

- 1) Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program kepala desa terpilih.
- 2) Memperhatikan hasil proses Musenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan desa.
- 3) Memperhatikan hasil dari proses penyusunan usulan kegiatan masyarakat.⁶⁴

e. Top-down Planning, perencanaan dari atas yang dimaksud bahwa proses penyusunan rencana pembangunan desa perlu bersinergi dengan rencana strategis di atasnya dan komitmen pemerintahan atasan berkaitan:

- 1) Rencana pembangunan desa harus sinergi dengan arah dan kebijakan di tingkat daerah (kabupaten/kota).
- 2) Rencana pembangunan desa merupakan bentuk sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan pembangunan global seperti *Millenium Development Goals (MDGs)*, *Sustainable*

⁶³ *Ibid*, Nurman, h. 264.

⁶⁴ *Ibid*, Nurman, h. 265.

Development, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan air bersih, sanitasi, dan infrastruktur dasar.⁶⁵

5. Pembangunan Desa dalam Manajemen Pembangunan Daerah

Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilihat dalam konteks pembangunan daerah. Hal itu tidak berarti menggugat atau memperlemah upaya otonomi desa tetapi justru memperkuat posisi tawar dan percepatan pembangunan di desa yang bersangkutan. Manajemen pembangunan daerah di tingkat kabupaten dan provinsi merupakan serangkaian kegiatan penyusunan dan penetapan kebijakan program pembangunan daerah di segala bidang baik sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, budaya, agama dan keamanan. Hasilnya berupa dokumen rencana jangka pendek (1 tahun) dituang dalam dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) yang terkait langsung dengan APBD, rencana jangka menengah (5 tahun) dituangkan dalam dokumen Program Pembangunan Daerah (Properda),

⁶⁵ *Ibid*, Nurman, h. 265

dan rencana jangka panjang (10-25 tahun) dituangkan dalam dokumen Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas).⁶⁶

Rencana pembangunan daerah dapat mengakomodasikan kepentingan desa ke depan yang berbeda dalam koordinasinya, sehingga apa pun yang tertuang dalam dokumen tersebut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di lapisan bawah, aspiratif serta memperkuat institusi lokal terutama di tingkat desa. Perencanaan pembangunan desa menghasilkan suatu dokumen RPJMDes yang logis dengan mempertemukan kebutuhan di tingkat daerah/kabupaten, provinsi dan skala nasional dengan kebutuhan berskala lingkungan RT, RW/ dusun dan desa. Rangkaian perencanaan pembangunan daerah dalam setiap tahun anggaran pelaksanaan dalam mekanisme sebagai berikut:

- a. Di tingkat masyarakat dilakukan identifikasi dan perumusan masalah dan kebutuhan, analisis potensi, penentuan prioritas, dan penyepakatan program swadaya, melalui forum warga RT, RW/ dusun.
- b. Di tingkat desa dilakukan pembahasan dan penyepakatan daftar prioritas usulan masyarakat yang akan dibiayai APBDesa dan atau APBD melalui forum Musbangdes.
- c. Di tingkat kecamatan dilakukan pembahasan dan penyepakatan daftar prioritas usulan masyarakat yang telah disepakati dalam

⁶⁶ *Ibid*, Nurman, h. 267.

musyawarahdesa dan akan dibiayai APBD melalui forum Musrenbang.

- d. Di ioritas susulan kecamatan yang akan dibiayai APBD melalui forum Rakorbang.

Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan melibatkan berbagai unsur pelaku dan kelembagaan yang ada di tingkat desa, baik lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat. Lembaga tersebut di antaranya, pemerintah desa, BPD, pengurus RT/RW, paguyuban atau kelompok swadaya masyarakat, kelompok perempuan, tim teknis, pemerintah daerah (kabupaten/kota), DPRD, forum perkotaan, LPMD, atau lembaga potensial lainnya.⁶⁷

Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas harus melihat keterkaitan antardesa, desadalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten dan antarkabupaten.

B. Konsep Pembangunan dalam Islam

1. Pengertian Pembangunan dalam Islam

Pembangunan dalam Islam diartikan sebagai menerima pembangunan asing, barat dan timur yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat dan menolak apa-apa yang berbahaya berteraskan kepada

⁶⁷ *Ibid*, Nurman, h. 269.

nilai-nilai hidup Islam. Muhammad Akhir dan Hailani menyatakan definisi pembangunan ialah pembangunan Islam adalah berlandaskan kepada orientasi nilai dengan perhatian untuk meningkatkan kebijakan umat Islam dari semua aspek (morak, kebendaan, dan kerohanian) untuk mencapai kemaslahatan dan kedamaian hidup di dunia dan di akhirat. Definisi pembangunan, mewujudkan kehidupan yang tentram dan sejahtera kepada manusia, yaitu kehidupan yang memenuhi keperluan rohani dan jasmani manusia.⁶⁸

Pembangunan Islam adalah pembangunan insaniah manusia sendiri. Pembangunan yang diketengahkan Islam adalah pembangunan yang datangnya dari pada kesedaran yang tinggi dari umatnya yang saling bekerjasama dan bukannya datang daripada satu kelomok yang kecil. Konsep pembangunan dalam Islam ialah sebagai berikut:

- a. Pembangunan adalah sebahagian daripada Islam itu sendiri.
- b. Pembangunan dalam Islam adalah keupayaan bersama.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
- d. Pembangunan haruslah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Di dalam Al-Qur'an sendiri Allah menerangkan tentang pembangunan ini adalah mengenai bagaimana kita membangun desa dalam hal gotong royong dan tolong menolong, yang sangat di anjurkan dalam Islam, karena dengan tolong menolong dan gotong royong maka

⁶⁸ Nur Sahida Mohammad dkk, "Pembangunan Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Awalan", Jurnal Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke VIII, ISSN: 2231-962X, 2013, h. 362.

pekerjaan yang sangat sulit akan dapat terlaksana dengan baik dan dapat dikerjakan dengan mudah. Islam memberikan ruang kepada manusia mencapai kesenangan dan kejayaan di dunia, usaha mengejar kemewahan dunia tidak boleh dipisahkan dari aspek akhlak yang bertindak selalu mengawas, demi mengelakkan kerusakan kepada manusia itu sendiri.

Garis panduan untuk melaksanakan pembangunan dalam Islam:

- a. Kita tidak boleh melupakan tugas yang telah diwajibkan ke atas kita oleh Allah.
- b. Tidak boleh melupakan kedudukan kita sebagai khifah Allah di muka bumi. Segala yang dimiliki adalah hak Allah dan apa yang dimiliki adalah amanah.
- c. Mesti menanam nilai-nilai agama dan akhlak.
- d. Menjadikan Pembangunan sebagai sumber kekuatan dan bukan sebagai sumber kelemahan.
- e. Memastikan pembangunan tersebut mencapai tujuan dan matlamat yang berdasarkan hukum-hukum syara' dan nilai-nilai akhlak yang tidak menyalahgunakan kuasa.⁶⁹

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuasaan atau kemampuan. Berasal dari pengertian tersebut,

⁶⁹ *Ibid*, Nur Sahida Mohammad, h. 363.

maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju budaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah itu benar tetapi tidak tepat. Pemberdayaan yang dimaksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan”. *Empowerment*, dalam khasanah barat lebih bernuansa “pemberi kekuasaan” daripada “pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang tepat adalah “energize” atau katakan “memberi energi”. Pemberdayaan adalah pemberi energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.⁷⁰

Menurut Wahjudin Sumpeno, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditunjukkan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi, pemberdayaan adalah upaya yang ditunjukkan agar suatu tatanan dapat

⁷⁰ Ambar Teguh Sulistiani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hlm. 78

mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.⁷¹

Pemberdayaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa ditunjukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.⁷² Desa yang otonom memberi ruang gerak yang luas dalam perencanaan pembangunan sebagai kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak dibebani oleh program kerja dari dinas atau instansi pemerintah. Upaya pemberdayaan dapat mempercepat proses penyiapan masyarakat melalui berbagai cara dan pendekatan yang mampu mewedahi sluruh komponen sumber daya manusia dan kelembagaan. Proses pemberdayaan perlu dilakukan dengan sangat cermat, karena setiap tatanan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga tidak semua strategi yang berasal dan luar tatanan akan efektif, bahkan dalam banyak hal tidak jarang bersifat kotra produktif. Pemberdayaan memerlukan proses dalam penyesuaian yaitu seperti budaya, dan kelembagaan melalui reintrepretasi, reaktualisasi, dan transformasi. United Nations, mengemukakan proses pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- a. *Getting to knowthe local community*. Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang

⁷¹ *Op., Cit*, Nurman, Hlm. 246.

⁷² *Ibid*, Nurman, Hlm. 246.

satu dengan lainnya. Mengetahi hubungan timbal balik antara petugas pendamping dengan masyarakat.

- b. *Gathering knowledge about the local community.* Mengumpulkan pengetahuan menyangkut informasi mengenai pola kehidupan masyarakat setempat. Pengetahuan merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan custom, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.
- c. *Identifying the local leaders.* Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan apabila tidak didukung oleh pemimpin atau tokoh masyarakat setempat. Oleh karena itu dalam proses pemberdayaan, faktor “*the local leaders*” harus selalu diperhitungkan karena mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.
- d. *Stimulating the community to realize that it has problems.* Di dalam masyarakat yang terkait dengan adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar masyarakat tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, diperlukan pendekatan persuasif agar masyarakat menyadari adanya masalah yang perlu di pecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.⁷³
- e. *Helping people to discuss their problem.* Memberdayakan masyarakat mengandung makna mendorong dan merangsang

⁷³ *Ibid*, Nurman, Hlm. 247.

inisiatif untuk melibatkan diri dalam pembahasan masalah serta merumuskan alternatif pemecahan dalam suasana kebersamaan.

- f. *Helping people to identify their most pressing problems.* Masyarakat di bimbing agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi serta menetapkan skala prioritas yang paling berpengaruh terhadap kebutuhan dasar.
- g. *Fostering self-confidence.* Membangun rasa percaya diri masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan.
- h. *Deciding on a program action.* Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program aksi perlu ditetapkan berdasarkan skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.
- i. *Recognition of strengths and resources.* Memberdayakan masyarakat berarti meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengkaji lingkungan internal.
- j. *Helping people of continue to work on solving their problems.* Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian tindakan terencana yang diarahkan untuk mengubah kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.⁷⁴

⁷⁴ *Ibid*, Nurman, Hlm. 248.

k. *Increasing people ability for self-help*. Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat ialah untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian agar masyarakat mampu menolong diri sendiri. Keswadayaan menjadi nilai-nilai dasar dalam upaya pembangunan masyarakat.⁷⁵

2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan yang ingin di capai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengarahannya sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan masyarakat tersebut.⁷⁶

Menurut Paul Freire dalam Keban dan Lele, pemberdayaan masyarakat berinti pada suatu metodologi yang disebut *conscientization* yaitu merupakan proses belajar untuk melihat kontradiksi sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Paradigma ini mendorong masyarakat untuk mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur-struktur yang opresif. Bertolak dari pengertian ini maka sebuah

⁷⁵ *Ibid*, Nurman, Hlm. 248.

⁷⁶ *Op., Cit*, Ambar Teguh Sulistiani, h. 80.

partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas pada pelaksanaan suatu program saja melainkan menyentuh pada nilai politik.⁷⁷

3. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Kieffer, pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan.⁷⁸ Schuler, Hashemi, dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan, delapan indikator tersebut antara lain:

- a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari, dan kebutuhan dirinya. Individu dianggap mampu melakukan kegiatan

⁷⁷ *Op., Cit.*, Ambar Teguh Sulistiani, h. 82.

⁷⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Rakyat Dan Pekerjaan Sosial, Cet.5*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), h. 63.

ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

- c. Kemampuan membeli koditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder dan tersier.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan, mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama orang lain mengenai keputusan internal.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun ada orang yang mencuri dan sebagainya.
- f. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salh seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.⁷⁹
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan prote-protes: seseorang di anggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes.
- h. jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.⁸⁰

⁷⁹ *Ibid*, Edi Suharto, h. 64.

⁸⁰ *Ibid*, Edi Suharto, h. 66.

4. Strategi Pemberdayaan

Dalam beberapa situasi, strategipemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya.⁸¹ Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan dengan tiga aras atau matra pemberdayaan, yaitu:

- a. **Aras Mikro**, pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat (klien) secara individu melalui bimbingan, konsling, *setress management*, *crisis intervetion*. Tujuan utamanya adalah membimbing dan melatih dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
- b. **Aras Mezzo**, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok masyarakat (klien). Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan sekelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- c. **Aras Makro**, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan

⁸¹ *Ibid*, Edi Suharto, h. 66.

yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.⁸²

5. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam

Islam merupakan Agama yang menekankan pada kepedulian sosial, karena Islam menegaskan bahwa misi adalah akuntabilitas sosial, tanpa implikasi sosial ritual Islam akan dilakukan secara sia-sia.⁸³

Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Pengertian pemberdayaan masyarakat Islam adalah suatu proses atau tindakan yang terjadi di Indonesia dengan memberikan rasa tanggung jawab terhadap konteks ekonomi. Dengan demikian masyarakat muslim dituntut untuk lebih keras untuk bekerja, berinteraksi, dan berwirausaha.⁸⁴

⁸² *Ibid*, Edi Suharto, h. 67.

⁸³ Titis Istikomah, “ Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui *Enterpreneurship Capacity Building*, (ECB) Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Study Pada Kelompok Tani Kecamatan Talang Padang), Skripsi Program Strata 1 IAIN Lampung, 2015), h. 45.

⁸⁴ *Ibid*, Titis Istikomah, h. 49.

Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam islam perlunya di terapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan gerakan perubahan. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidupnya ke yang lebih baik. Dalam agama Islam memiliki konsep pemberdayaan masyarakat dalam kitab suci yaitu Al-qur'an Q.S Ar-Ra'd ayat 11:



لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَّالٍ

*Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.*⁸⁵

Berdasarkan ayat At-Ra'd ayat 11 yang menyebutkan bahwa Tuhan tidak akan merubah Keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka. Sehingga dengan mereka dapat mengelola dan membentuk

⁸⁵ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahnya Q.S: Ar-Ra'd (13) ayat 11, PT Syaamil Cipta Media, Bandung, 2005, h. 370.

penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya pula dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

Dalam surat an-anfal (08): 53 juga dijelaskan mengenai pemberdayaan masyarakat/pembangunan melalui pendekatan pribadi-pribadi masyarakat.

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “(siksaan) yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu meubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*⁸⁶

Sebagai sebuah ajaran yang bersifat Rabbaniyyah yang tidak akan lekang oleh zaman dan senantiasa menjadi solusi atas segala bentuk tantangan zaman, islam menawarkan konsep pembangunan masyarakat yang bermula pada pembangunan karakter pribadi-pribadi manusia yang dalam teori pembangunan/pemberdayaan masyarakat dikenal sebagai pendekatan yang berpusat pada manusia. Sama hanya seperti penjelasan surat an-anfal (08): 53 bawasanya perubahan yang terjadi pada diri manusia merupakan upaya yang ada dalam diri manusia tersebut untuk merubahnya sendiri. Manusia yang akan berubah dan berusaha akan

⁸⁶ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahnya Q.S: Al-Anfaal (58) ayat 53, PT Syaamil Cipta Media, Bandung, 2005, h. 270.

dimudahkan Allah dalam segala urusannya. Melalui pemberdayaan masyarakat ini membukakan jalan bagi hambanya untuk dapat merubah keadaannya menjadi lebih baik lagi.

kegiatan yang dilakukan dalam pembangunan masyarakat Islam terdiri dari kegiatan pokok berupa transformasi dan pelembagaan ajaran Islam kedalam realitas Islam, sebagai berikut:

- a. Penyampaian konsep Islam mengenai kehidupan sosial, ekonomi, dan pemeliharaan lingkungan.
- b. Penggalangan Ukhuwah Islamiah lembaga umat dan kemasyarakatan pada umumnya dalam rangka mengembangkan komunitas dan kelembagaan Islam.
- c. Menjalin dan mewujudkan berbagai MOU (Memorandum of Understanding) dengan berbagai kekuatan masyarakat.
- d. Riset potensi lokal dakwah, pengembangan potensi lokal dan pengembangan kelompok swadaya masyarakat.
- e. Katalisasi dan dampingan teknis kelembagaan.
- f. Konsultasi dan dampingan teknis kelembagaan.
- g. Mendampingi penyusunan rencana dalam rangka pengembangan komunitas dan istitusi Islam.
- h. Memandu pemecahan masalah sosial, ekonomi , dan lingkungan umat.
- i. Melaksanakan stabilitas kelembagaan dan menyiapkan masyarakat untuk memebangun secara mandiri dan berkelanjutan.

6. Sasaran Pemberdayaan

Perlu dipikirkan siapa yang sesungguhnya menjadi sasaran pemberdayaan. Schumacher memiliki pandangan pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin dengan tidak harus menghilangkan ketimpangan struktural lebih dahulu. Masyarakat miskin sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan demikian memberikan “kail jauh lebih tepat daripada memberikan ikan”. Di samping itu NGO merupakan agen yang mendapat posisi penting, karena dipandang lebih bersifat *entrepreneur*, berpengalaman dan inovatif dibandingkan pemerintah. Pemaknaan pemberdayaan selanjutnya sering dengan konsep *good governance*. Konsep ini menyetengahkan ada tiga pilar yang harus dipertemukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjalin hubungan kemitraan yang selaras.⁸⁷

7. Perencanaan Program

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seringkali melibatkan perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program atau proyek kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakat. Sebagai suatu kegiatan kolektif, pemberdayaan masyarakat melibatkan beberapa aktor, seperti pekerja sosial, masyarakat tempat, lembaga atau instansi

⁸⁷ *Op., Cit*, Ambar Teguh Sulistiyani, h. 90.

yang terkait, yang saling bekerjasama mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi terhadap program atau proyek pembangunan yang perumusannya dilakukan melalui perencanaan program.⁸⁸

Hakekat perencanaan atau model perencanaan, dan proses perencanaan program, perencanaan adalah sebuah proses penting dalam menentukan keberhasilan suatu tindakan. Perencanaan pada hakekatnya merupakan usaha secara sadar, terorganisir dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu.

perencanaan sosial masyarakat memiliki kaitan yang erat dengan perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, meskipun perencanaan sosial masih sering diartikan secara luas (menyangkut kemiskinan, pendidikan, kesehatan), perencanaan sosial pada hakikatnya menunjuk pada perencanaan mengenai program pelayanan kesejahteraan sosial maka bidang kesejahteraan sosial ini merujuk pada suatu serangkaian kegiatan yang terorganisasi yang ditujukan untuk memungkinkan individu, kelompok dan masyarakat dapat memperbaiki keadaan mereka sendiri, menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, serta dapat berpartisipasi dalam tugas-tugas pembangunan.⁸⁹

⁸⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Rakyat Dan Pekerjaan Sosial*, Cet.3, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), h. 132.

⁸⁹ *Ibid*, Edi Suharto, h. 133.

D. Alokasi Dana Desa

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat1 (d) dan ayat 4 tentang Desa menyatakan pemerintah mengamanatkan bahwa sumber pendaatan asli daerah berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).⁹⁰ Dibagi untuk setiap Desa secara Proposional merupakan Alokasi Dana Desa. Sedangkan pengelolaan keuangan ADD diatur dalam Negeri 43 Tahun 2014 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 96 ayat 2 Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa pling sedikit 10%.⁹¹

1. Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk:

⁹⁰ Azwardi Sakanto “ Efektifitas Alokasi Dana Desa Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatra Selatan “, (Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Palembang, 2012), h. 30.

⁹¹ Rosnawati, “Analisis Program Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Waykanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kecamatan Negeri Besar), Skripsi Program Strata 1 Iain Lampung, 2015), h. 25.

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Dana Alokasi Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat harus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datanya dana bantuan dari pemerintah pusat.

2. Penetapan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada ketetapan-ketetapan berikut ini:

- a. Penetapan dan hasil perhitungan ADD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan bupati.

- b. Penetapan dan hasil perhitungan ADD dimaksud diberitahukan kepada desa selambat-lambatnya bulan agustus disetiap tahunnya.
- c. Data variabel independen tambahan selambat-lambatnya dikirim oleh tim pendamping tingkat kecamatan kepada tim fasilitasi kabupaten pada bulan maret untuk penghitungan ADD tahun berikutnya.⁹²

3. Penggunaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk menyelenggaraan pemerintah desa sebesar 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa sebesar 70%.
- b. Alokasi Dana desa diarahkan untuk membiayai kegiatan meliputi:
 - 1) Peningkatan sumber daya manusia, Kepala Desa dan perangkat Desa meliputi pendidikan, pelatihan, pembekalan, studi Banding.
 - 2) Biaya operasional Tim Pelaksanaan Bidang Pemerintahan.
 - 3) Biaya tunjangan Kepala Desa, tunjangan dan operasional BPD, honor ketua RT dan RW serta penguatan kelembagaan RT/RW.
 - 4) Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa.

⁹² *Ibid*, Rosnawati, h. 26

- 5) Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggung jawaban meliputi:⁹³

4. Pengelolaan ADD mengacu pada asas:

- a. Asas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- b. Asas adil adalah besarnya abagian Alokasi Dana Desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus variabel tertentu, (mislanya jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, dan lainnya, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa proporsional. Besarnya persentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah besarnya ADDM adalah 60% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% dari jumlah ADD.⁹⁴

Alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa, tujuan alokasi dana desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

⁹³ *Ibid*, Rosnawati, h. 26.

⁹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 97 Ayat 2.

- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- d. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Berdasarkan prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Alokasi Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.⁹⁵ Sedangkan mekanisme penyairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa adalah :

- a. Pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan persentase tertentu yang telah ditetapkan.

⁹⁵ *Ibid*, Rosnawati, h. 27.

- b. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
- c. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggung jawabkan baik secara administratif, secara teknis, dan secara hukum.
- d. Pencairan baik tahap pertama maupun tahap kedua dilakukan dengan pemindahan bukuan dana rekening kas daerah ke rekening kas desa.
- e. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepal pelaku aktivitas (pemimpin pelaksanaan kegiatan) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran (spp) kepada Kepala Desa melalui sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
 - 2) Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa.
 - 3) Bendahara Desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada Bank yang ditunjuk.

- 4) Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.⁹⁶



⁹⁶ *Ibid*, Rosnawati, h. 29.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Desa Candimas

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Candimas

Desa candimas merupakan salah satu desa yang cukup tua di Kabupaten Lampung Utara khususnya Kecamatan Abung Selatan. Desa Candimas berdiri pada tanggal 26 Februari 1971, beralamat di Jalan Raya Candimas KM 41 Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Desa Candimas terdiri dari lahan seluas 3,414 ha/m² dan terdiri dari 3 dusun dan 58 RT. Dahulu Desa Candimas merupakan induk dari beberapa desa, kemudian pada tahun 2010 dipecah menjadi Desa Candimas, Desa kalibening Raya, Desa Kembang gading dan Desa Abung Jayo.

Kepala Desa pertama bernama Supardi, sejak tahun 2006 Kepala Desa di jabat oleh Muhammad Hasby, Nurrochman, dan saat ini adalah Zainal Abidin.

2. Kondisi Geografis Desa Candimas

Desa Candimas merupakan sebuah desa dengan luas wilayah 3.414 ha/m², dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan: Desa Abung Jaya Kecamatan Abung Selatan.

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan: Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan: Desa Kalibening Raya Kecamatan Abung Selatan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan: Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan.

Luas Wilayah 3.414 ha/m² dengan rincian sebagai berikut:

- a. Luas pemukiman : 371,5 ha/m²
- b. Luas persawahan : 1,5 ha/m²
- c. Luas perkebunan : 2,750 ha/m²
- d. Luas kuburan : 0,5 ha/m²
- e. Luas pekarangan : 235,75 ha/m²
- f. Luas perkantoran : 0,05 ha/m²
- g. Luas ladang : 254,5 ha/m²

3. Tata Pemerintahan Desa Candimas

Pemerintah desa Candimas terdiri dari kepala desa serta perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa berkoordinasi dengan BPD dan dibantu oleh sekretaris dan bendahara desa. Setiap kepala dusun Desa Candimas berhubungan langsung dengan Kepala Desa.

4. Kondisi Demografi

Penduduk desa candimas pada tahun 2016 terdiri dari 4.433 jiwa yang terdiri dari 2.278 laki-laki, 2.155 perempuan, dan 1.169 jumlah kepala keluarga (KK), dengan kepadatan penduduk 129 jiwa/km².

a. Jumlah penduduk

Tabel 1.1

Penduduk Desa Candimas Berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	perempuan	
1.	2.278 jiwa	2.155 jiwa	4.433 jiwa

Sumber : Monografi Desa Candimas Tahun 2016

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk di Desa Candimas berjumlah 4.433 jiwa. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan hampir setara meskipun lebih banyak penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

B. Pembangunan Infrastruktur desa Candimas

1. Jenis-jenis Pembangunan Infrastruktur Desa Candimas

Pembangunan infrastruktur di Desa Candimas merupakan sebuah tindakan nyata yang di programkan oleh pemerintah Lampung utara dalam pengalokasian dana desa.

Tabel 1.2
Alokasi Dana Desa
Tahun Anggaran 2016

(dalam ribuan)

No	Nama Daerah	Jumlah Desa	Alokasi Dasar		Alokasi Formula	Jumlah
			Per/Desa	Per/Kab Kota		
1	Kab. Lampung Barat	131	565.640	74.098.840	7.329.967	81.428.807
2	Kab. Lampung Selatan	256	565.640	144.803.840	20.519.994	165.323.834
3	Kab. Lampung Tengah	301	565.640	170.257.640	19.331.931	189.589.834
4	Kab. Lampung Utara	232	565.640	131.288.480	15.891.890	147.120.370
5	Kab. Lampung Timur	264	565.640	149.328.960	21.607.251	170.936.211
6	Kab. Tanggamus	299	565.640	169.126.360	14.267.027	183.393.387
7	Kab Tulang Bawang	147	565.640	83.149.080	9.883.756	93.032.836
8	Kab. Way Kanan	221	565.640	125.006.440	12.165.672	137.172.112
9	Kab. Pesawaran	144	565.640	81.452.160	11.778.969	93.231.129
10	Kab. Pringsewu	126	565.640	71.270.640	6.889.011	78.159.651
11	Kab. Mesuji	105	565.640	59.392.200	6.567.633	65.959.833
12	Kab. Tulang Bawang Barat	93	565.640	52.604.520	6.629.147	59.233.667
13	Kab. Pesisir Barat	166	565.640	65.614.240	6.566.402	72.180.642
Jumlah		2.435	565.640	1.377.333.400	159.428.650	1.536.762.050

*Sumber : data alokasi dana desa 2016

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengeluarkan dana sebesar Rp. 147.120.370.000 dan di bagi kepada 232 desa yang ada di Lampung Utara. Setiap desa memperoleh dana sebesar Rp. 650.000.000 sampai Rp. 900.000.000. Sumber dana yang diperoleh Desa Candimas berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari dana transfer yang diberikan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Dana yang di terima Desa Candimas sebesar **Rp. 747.233.895** yang dialokasikan sebanyak 70% untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur desa dan 30% untuk operasional desa, pencairan dana

dilakukan melalui dua tahapan, yaitu tahapan pencairan dana pertama sebesar 60% dan tahapan kedua sebesar 40%.⁹⁷

Adapun pembangunan yang dilakukan di Desa Candimas sebagai berikut:

Tabel 1.3

Data Pembangunan Infrastruktur

Desa Candimas Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara

No.	Pembangunan	Lokasi	Dana
1.	6 Titik Sumur Bor.	1. Balai desa candimas 2. RT 05 RW 04 3. RT 04 RW 04 4. Pasar desa candimas 5. Mushola Daru Husada RT 01 RW 02 6. Mushola Baitu Rahman RT 03 RW 02	Rp. 146.693.500
2.	2 Unit TPT (Talut Penahan Tanah) 366 Meter.	1. RT 04 RW 04 2. RT 04 RW 04	Rp. 130.000.000
3.	Drainase (Suring Pasang) 791 Meter.	1. RT 03 RW 02	Rp. 168.000.000
4.	2 Buah Gorong-gorong Plat.	1. RT 04 RW 04 2. RT 04 RW 04	Rp. 8.300.000
5.	Rabat Beton (Jalan Cor) 171 Meter.	Jalan penghubung antara RT satu ke RT lainnya	Rp.158.200.000
6.	Jalan Lapen 800 M.	Jalan penghubung antara RT satu ke RT lainnya.	Rp.56.000.000
Jumlah			Rp. 667.193.500

*Sumber : Data Program Alokasi Dana Desa⁹⁸

⁹⁷ Abi, Wawancara dengan Kaur Pembangunan Desa Candimas, Kantor Kelurahan Candimas Abung Selatan, 25 Januari 2017.

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 6 (enam) pembangunan yang dilakukan di Desa Candimas sejumlah Rp. 667.193.500, sebagai bentuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang dilakukan guna memberikan kemudahan akses dan perbaikan mutu sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan infrastruktur tersebut memakan waktu 2 bulan lamanya. sedangkan sisanya dana desa sejumlah Rp. 80.040.395 digunakan untuk operasional kantor Desa Candimas. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pembangunan dan perbaikan yang diadakan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan kemudahan akses yang didapatkan.

Untuk lebih jelas penulis akan memaparkan pengelolaan di masing-masing RT/RW yang di adakan pembangunan:

a. Pembangunan Sumur Bor

Pembangunan sumur bor di Desa Candimas dilakukan di 5 tempat yaitu Balai desa candimas, RT 05 RW 04, RT 04 RW 04, Pasar desa canimas, Mushola Daru Husada RT 01 RW 02, Mushola Baitu Rahman RT 03 RW 02. Operasional pembuatan sumur bor sejumlah 6 unit dibeberapa titik tersebut menghabiskan dasar sebesar Rp. 146.693.500, besaran harga pembuatan sumur bor berdasarkan kedalaman tempat penggalian menemukan titik mata air.⁹⁹

⁹⁸ Abi, Wawancara (Riset) dengan Kaur Pembangunan Desa Candimas, Kantor Kelurahan Candimas, Kecamatan Abung Selatan, 17 Februari 2017.

⁹⁹ Abi, Wawancara (Riset) dengan Kaur Pembangunan Desa Candimas, Kantor Kelurahan Candimas, Kecamatan Abung Selatan, 17 Februari 2017.

b. Unit TPT (Talut Penahan Tanah)

Pembangunan 2 Unit TPT (Talut Penahan Tanah) yang dibuat di Desa Candimas RT 04 RW 04. Pembangunan talut penahan tanah di RT 04 RW 04 dilakukan karena kondisi tanggul penahan tanah Desa Candimas juga mengalami kerusakan sehingga tidak dapat menahan tekanan air hujan yang meluap atau menggenangi badan jalan, dan apabila dibiarkan tanah yang berada di kanan dan kiri jalan akan mengalami kelongsoran dan akan berakibat padakeselamatan warga yang kerap melintasi jalan yang akhirnya akan mengakibatkan terganggunya aktifitas masyarakat desa. Pembangunan talut penahan tanah memiliki tujuan yaitu memaksimalkan fungsi jalan agar lebih dapat bertahan lama dan baik, apabila jalan yang menggunakan talut penahan tanah di sisi kanan dan kiri jalan maka aliran air akan menjadi lancar, sehingga air tidak menggenangi di jalan serta membuat permukaan tanah jalan menjadi lebih baik.

Operasional pembuatan talut penahan tanah sebanyak 2 unit dengan dibagun 2 tipe yakni tipe 100 dan tipe 80. talut penahan tanah tipe 100 dibangun sepanjang 117 meter, sedangkan talut penahan tanah tipe 80 di bangun sepanjang 249 meter. Pembangunan TPT (talut penahan tanah) tersebut menghabiskan dasar sebesar Rp. 130.000.000 proses pembuatan talut penahan tanah yang dilakukan oleh desa Candimas melihat keadaan yang terjadi di desa karena

talut penahan tanah dapat membuat masalah yang lain apabila tidak segera dibenahi.¹⁰⁰

c. Drainase (Siring Pasang)

Pembangunan Drainase (Suring Pasang) dilakukan di RT 03 RW 02. Pembangunan Drainase (siring pasang) dibangun dengan tipe 50 yaitu sepanjang 791 meter. pembangunan siring pasang tersebut menghabiskan sebesar Rp. 168.000.000 proses pembuatan sumur bor diberbagai titik tersebut melalui proses dan melihat kondisi di RT/RW yang mana tempatnya strategis untuk dibangun drainase (siring pasang).¹⁰¹

d. Gorong-gorong Plat

Pembangunan gorong-gorong plat yang di lakukan di RT 04 RW 04. Operasional pembuatan gorong-gorong plat sejumlah 2 unit di beberapa titik tersebut menghabiskan dasar sebesar Rp. 8.300.000, proses pembuatan gorong-gorong plat tersebut melalui proses dan melihat kondisi gorong-gorong mana yang telah rusak dan tempat mana perlu di bangun gorong-gorong.¹⁰²

¹⁰⁰ Abi, Wawancara (Riset) dengan Kaur Pembangunan Desa Candimas, Kantor Kelurahan Candimas, Abung Selatan, 17 Februari 2017.

¹⁰¹ Abi, Wawancara (Riset) dengan Kaur Pembangunan Desa Candimas, Kantor Kelurahan Candimas, Abung Selatan, 17 Februari 2017.

¹⁰² Yana Setyaningsih, Wawancara (Riset) dengan Bendahara Desa Candimas, Kantor Kelurahan Candimas, Abung Selatan, 17 Februari 2017.

e. Rabat Beton (Jalan Cor)

Pembuatan jalan cor dilakukan di desa Candimas di jalan-jalan penghubung antar desa. pembuatan jalan cor sepanjang 171 meter dengan anggaran biaya sebesar sebesar Rp. 158.200.000.¹⁰³

f. Jalan Lapen (Lapisan Penetrasi Macadam)

Pembuatan Jalan Lapen (Lapisan Penetrasi Macadam) di desa Candimas dibangun di jalan-jalan penghubung antar RT yang telah rusak dan jalan jalan yang telah rusak parah seperti jalan yang berada di jalan 100 meter sebelum perlintasan kereta api yang sangat parah kondisinya, jalan berlubang rusak dan tergenang air jika terjadi hujan yang apabila tidak segera diperbaiki akan manambah banyak daftar korban kecelakaan.

Operasional pembuatan jalan lapen (lapisan penetrasi macadam) sepanjang 800 meter, menghabiskan dasar sebesar Rp.56.000.000, proses pembuatan jalan lapen melihat kondisi lapangan.¹⁰⁴

Setelah dilakukannya 6 (enam) aspek pembangunan dan perbaikan kondisi desa candimas saat ini mengalami kemajuan yang baik, infrastruktur pembuatan jalan yang telah dilakukan mempermudah masyarakat yang melintasi untuk melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari, selain itu para pedagang keliling juga lebih mudah melintasi jalan

¹⁰³ Yana Setyaningsih, Wawancara (Riset) dengan Bendahara Desa Candimas, Kantor Kelurahan Candimas, Abung Selatan, 17 Februari 2017.

¹⁰⁴ Yana Setyaningsih, Wawancara (Riset) dengan Bendahara Desa Candimas, Kantor Kelurahan Candimas, Abung Selatan, 17 Februari 2017.

yang ada di Desa Candimas, kecelakaan dan tergelincirnya kendaraan pun dapat diminimalisir karena kondisi jalan yang telah baik dan mulus. Banjir dan terendamnya sawah-sawah petani pun saat ini telah dapat ditanggulangi karena telah dibangunnya talut penahan air dan drainase untuk mengalirkan air di pinggir jalan akibat hujan ke sungai. Selain itu pembuatan sumur bor yang telah di bangun sebanyak 6 unit di titik-titik yang dianggap mudah mengakses tempat pengambilan air, masyarakat sudah tidak sulit mendapatkan air bersih dengan jarak tempuh yang semakin dekat karena jalanan yang telah diperbaiki menjadi mulus dan baik.¹⁰⁵

C. Pemberdayaan yang di Lakukan Pada Desa Candimas

Desa Candimas merupakan desa yang berada di Kecamatan Abung Selatan Lampung Utara. desa candimas merupakan desa yang memiliki penduduk 4.433 jiwa dengan penduduk yang memiliki berbagai macam pekerjaan yng beragam.

Mengacu pada pasal 72 ditetapkan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Selanjutnya, kebutuhan pembangunan tersebut meliputi, pada kebutuhan primer yang tidak terbatas,

¹⁰⁵ Abi, Wawancara (Pra Riset) dengan Kaur Pembangunan Desa Candimas, Kantor Kelurahan Candimas, Abung Selatan, 17 Januari 2017.

pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁰⁶

Saat ini banyak program pembangunan desa yang berusaha untuk memberantas kemiskinan yang terjadi pada sebagian besar masyarakat di pedesaan. Oleh karena itu, diperlukannya pemberdayaan yang ditunjukkan kepada masyarakat agar mereka lebih mandiri dalam menghadapi berbagai tantangan hidup yang semakin tidak terkendali setiap harinya. Sangat banyak faktor yang melatarbelakangi adanya pemberdayaan, hal ini didasari oleh kemiskinan yang menimbulkan permasalahan yang beragam baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Berawal dari sinilah munculnya berbagai program yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan tujuan untuk membangkitkan dan mendorong kemampuan masyarakat terutama masyarakat yang berada pada wilayah desa.

Salah satu program tersebut adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Adanya pemberian ADD adalah sebagai bantuan untuk membiayai dan mendorong program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan memberdayakan masyarakat. ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa dalam menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa tersebut berdasarkan demokratis, dan pemberdayaan masyarakat.

¹⁰⁶ Ibrodi Wilson, Wawancara (Riset) Dengan Kepala Kecamatan, Kantor Kecamatan Abung Selatan, 1 maret 2017.

Saat ini ditemukan banyaknya kelemahan yang muncul ketika alokasi dan desa dimanfaatkan dalam rangka kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dari permasalahan yang muncul akan mengakibatkan penyelewengan dana sehingga alokasi dana desa menjadi tidak tepat sasaran, dan biasanya hal ini terjadi karena ketidakmampuan aparatur desa dalam mengelola dana dan tidak memiliki kompetensi yang cukup baik dalam pengelolaan dana tersebut. Oleh karena itu kondisi seperti inilah yang menyebabkan banyaknya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menjadi tidak optimal.

Dengan adanya alokasi dana desa membuka jalan untuk memperbaiki kondisi dari infrastruktur yang perlu dilakukan pembangunan dan perbaikan. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada Desa Candimas direncanakan pada awal tahun 2016 yang mana sebelum dilakukannya pembangunan aparatur desa meninjau kembali program apa saja yang akan dilakukan pada pembangunan infrastruktur pada tahun tersebut. Aparatur desa melakukan pembangunan infrastruktur berdasarkan hasil keputusan yang dibuat atau yang di diskusikan satu bulan sebelum dilakukannya pembangunan infrastruktur oleh pihak internal aparatur desa dengan melihat kondisi yang dibutuhkan di lapangan.¹⁰⁷

Dari hasil keputusan yang dibuat pihak internal desa, disepakati ada enam program pembangunan infrastruktur pada Desa Candimas antara lain :

¹⁰⁷ Abi, Wawancara (Riset) Dengan Kaur Pembangunan Desa Candimas, Kantor Kelurahan Candimas, Kecamatan Abung Selatan, 17 Februari 2017.

1. Program pembuatan 6 Sumur Bor

Dibuatnya sumur bor pada 6 lokasi yang telah ditentukan ini dikarenakan sebelum pembuatan sumur bor aparat desa yang menangani program pembangunan infrastruktur meninjau lokasi bersama pekerja yang akan membuat sumur bor untuk melihat lokasi mana saja yang terdapat titik mata air agar disaat sudah terbuatnya sumur bor menghasilkan air yang banyak, serta air yang berkualitas baik. Peninjauan lokasi ini dilakukan agar air yang diperoleh tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu setelah peninjauan lokasi diperolehnya 6 lokasi tempat pembagunan infrastruktur antara lain : Kantor Desa Candimas, lokasi RT 05 RW 04, lokasi RT 04 RW 04, lokasi pasar Desa Candimas, lokasi mushola Daru Husada RT 01 RW 02, dan lokasi mushola Baitu Rahman RT 03 RW 02.¹⁰⁸

2. Program Pembuatan Talut Penahan Tanah

Pembuatan talut penahan tanah yang berada dilokasi RT 04 RW 04 sepanjang 366 meter, dilakukan pembangunan karena pada lokasi tersebut memiliki tekstur tanah kurang baik yang rentan tergerus oleh air, kontruksi jalan yang dilintasi kendaraan juga salah satu alasan dibuatnya TPT. Jika dibiarkan begitu saja makan akan berdampak pada kondisi jalan yang akan dibuat nantinya. Hal ini dilakukan agar pembuatan jalan yang akan dibuat kondisinya tidak mudah rusak.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Abi, Wawancara (Riset) Dengan Kaur Pembangunan Desa Candimas, Kantor Kelurahan Candimas, Kecamatan Abung Selatan, 17 Februari 2017.

¹⁰⁹ Abi, Wawancara (Riset) Dengan Kaur Pembangunan Desa Candimas, Kantor Kelurahan Candimas, Kecamatan Abung Selatan, 17 Februari 2017.

3. Program Pembuatan Drainase

Pembuatan drainase yang di lakukan di Desa Candimas berada pada RT 03 RW 02 dengan pembuatan drainase sepanjang 791 meter, dilakukan pembuatan drainase pada lokasi tersebut karena pada lokasi yang sama akan dibuat jalan baru, karena pembuatan jalan yang akan dibangun akan dilengkapi dengan pembuatan drainase, dengan dilakukannya tindakan pembuatan drainase akan memperbaiki kondisi jalan yang tergenang air, kondisi daerah becek dan banjir.¹¹⁰

4. Program Pembuatan Gorong-Gorong

Pembuatan 2 buah gorong-gorong yang berada pada lokasi RT 04 RW 04 dikarenakan letaknya sesuai dengan lokasi yang tepat untuk dibuatnya gorong-gorong agar dapat berfungsi mengalirkan air dan mempunyai daya dukung terhadap beban lalu lintas dan tibanan pada tanah.¹¹¹

5. Program Pembuatan Rabat Beton (Jalan Cor)

Pembuatan rabat beton sepanjang 171 meter yang dibuat pada lokasi jalan yang masih berupa jalan tanah, yang mana kondisi jalan yang tidak memadai saat dilalui oleh masyarakat dikala musim hujan. Jalan ini merupakan jalan inti mengarah pada Kantor Desa Candimas.¹¹²

¹¹⁰ Abi, Wawancara (Riset) Dengan Kaur Pembangunan Desa Candimas, Kantor Kelurahan Candimas, Kecamatan Abung Selatan, 17 Februari 2017.

¹¹¹ Abi, Wawancara (Riset) Dengan Kaur Pembangunan Desa Candimas, Kantor Kelurahan Candimas, Kecamatan Abung Selatan, 17 Februari 2017.

¹¹² Abi, Wawancara (Riset) Dengan Kaur Pembangunan Desa Candimas, Kantor Kelurahan Candimas, Kecamatan Abung Selatan, 17 Februari 2017.

6. Program Pembuatan Jalan LAPEN (Lapis Penetrasi Macadam)

Pembuatan jalan lapen yang sepanjang 800 meter pada lokasi jalan-jalan utama pada Desa Candimas. Dibuatnya jalan lapen pada lokasi tersebut karena lokasi yang menjadi jalan utama yang sering dilintasi oleh kendaraan yang keluar masuk Desa Candimas, kondisi yang sebelumnya cukup rusak parah dan sering terjadinya kecelakaan disaat musim hujan yang mengakibatkan kerugian pada orang yang melintasi jalan tersebut, maka dengan dibangunnya jalan lapen di jalan-jalan utama maka akan membuat pelintas jalan lebih nyaman dan mengurangi angka kecelakaan di daerah tersebut.¹¹³

Dari keenam program yang di lakukan berdasarkan hasil diskusi pihak internal aparatur desa dijalankan berdasarkan keputusan yang diambil menggunakan tenaga pekerja luar desa. Keputusan ini diambil di karenakan aparatur menganggap agar masyarakatnya dapat langsung menikmati hasil dari pembangunan. Hal ini yang harus perlu diperhatikan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat yang mana dalam pemberdayaan masyarakat terhadap ADD, masyarakat dapat turut berpartisipasi dan ikut mengambil bagian dalam bentuk kegiatan kemasyarakatan. Makna dari partisipasi tak hanya ikut serta dalam tahap perencanaan saja melainkan dalam tahap pelaksanaan maupun tahap pengawasan.

¹¹³ Abi, Wawancara (Riset) Dengan Kaur Pembangunan Desa Candimas, Kantor Kelurahan Candimas, Kecamatan Abung Selatan, 17 Februari 2017.

Dari pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan tersebut maka dapat dibandingkan dengan harga per uni/meter dalam pembuatan keenam program tersebut dengan melihat harga menurut lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah Lampung.¹¹⁴ Perbandingan harga ini dilakukan untuk melihat pengoptimalan dalam bidang anggaran yang digunakan, sehingga apa yang ditinggalkan dalam pembangunan infrastruktur yang merupakan dananya bersumber dari ADD tidak di manfaatkan dalam bidang lain yang akan merugikan pembangunan desa.

Tabel 1.4
Biaya Pembangunan Infrastruktur Per Meter

No.	Jenis Pembangunan	Harga Per Unit/Meter
1.	Sumur bor	Rp. 14.250.00
2.	Talut penahan tanah	Rp. 349.987,5
3.	Drainase	Rp. 210.000
4.	Gorong-gorong	Rp. 3.775.000
5.	Rabat beton	Rp. 900.000
6.	Jalan lapen	Rp. 70.000

*Sumber: Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Dari tabel diatas dapat dilihat harga keenam jenis pembangunan dengan harga normal yang berada dipasaran dengan kualitas sedang. Kualitas yang dilihat tidak terlalu baik namun tidak juga terlalu buruk, dimana berada di tengah-tengah sesuai dengan yang sering digunakan pada umumnya pembangunan infrastruktur. Dari harga per meter/unit tersebut dapat di

¹¹⁴ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) (On-Line), Tersedia di: [Http:// www.infrastruktur Lampung.wordpers.com](http://www.infrastruktur Lampung.wordpers.com).

kalikan dengan jumlah unit atau meter dari pembangunan yang akan dilakukan. Dari perhitungan tersebut dapat dilihat apakah benar-benar optimal dalam setiap pembangunan yang dilakukan atukah terdapat pemborosan anggaran biaya yang di keluarkan oleh aparatur Desa Candimas. Perbandingan harga tersebut dapat dilihat pada bab selanjutnya.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Alokasi Dana Desa Pada Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara

Pada pembangunan infrastruktur desa dapat dilakukan dengan mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dengan program pemberdayaan masyarakat dapat membuat masyarakat berperan serta dalam perbaikan dan pembangunan yang dilakukan di Desa.

Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan seiring dengan kemajuan dan intensitas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan di desa seperti perbaikan jalan transportasi, drainase, sumur bor, talut penahan tanah dan lainnya.

Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalan potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitik beratkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian rakyat dalam jangka panjang. Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu

menumenkani kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola kebutuhan masyarakat dalam perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan.¹¹⁵

Adanya pembangunan Infrastruktur yang memberdayakan masyarakat akan berdampak pada dua pihak yaitu pihak masyarakat dan hasil pembangunan. Pada pihak masyarakat para pekerja yang dilibatkan merupakan pekerjaan pilihan yang memiliki keahlian, kemampuan dan mengerti pada bidang pembangunan infrastruktur dan memiliki fisik serta stamina yang kuat dalam pekerjaan lapangan.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 telah memberikan panduan dalam menyusun perencanaan desa yang memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Strategis, Perencanaan desa merupakan suatu kerangka kerja pembangunan yang komperensif dan sistematis dalam mencapai harapan yang dicita-citakan. Hasil perencanaan berupa pemikiran strategis dalam menggali gagasan dan isu-isu penting yang berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi pemerintahan desa dan masyarakat. Kebijakan strategis yang dituangkan dalam perencanaan desa merupakan arah perubahan dan orientasi pembangunan yang perlu dilakukan untuk mencapai harapan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kualitas dokumen perencanaan desa sangat ditentukan seberapa jauh

¹¹⁵ Lihat Bab II, h. 39.

dokumen perencanaan dapat mengungkapkan secara sistematis proses pemikiran strategis tersebut.¹¹⁶

2. Demokratis dan partisipasi, perencanaan desa merupakan dokumen milik bersama sebagai acuan kebijakan desa yang disusun secara partisipatif melibatkan pemangku kepentingan. Prinsip musyawarah dan partisipasi menjadi landasan dalam proses perencanaan di desa dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan perencanaan
3. Politik, rencana desa merupakan hasil kesepakatan berbagai unsur dan kekuatan politik dalam kerangka mekanisme kenegaraan yang diatur melalui undang-undang. Dengan kata lain, hasil perencanaan desa sebagai seluruh produk politik yang dalam penyusunannya melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politisi terutama kepala desa dan BPD.
4. Bottom-up Planning, perencanaan dari bawah yang dimaksud bahwa proses penyusunan rencana pembangunan desa harus memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
5. Top-down Planning, perencanaan dari atas yang dimaksud bahwa proses penyusunan rencana pembangunan desa perlu bersinergi dengan rencana strategis di atasnya dan komitmen pemerintahan atasan berkaitan
 - a. Rencana pembangunan desa harus sinergi dengan arah dan kebijakan di tingkat daerah (kabupaten/kota).

¹¹⁶ Lihar Bab II, h. 42.

- b. Rencana pembangunan desa merupakan bentuk sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan pembangunan global seperti *Millenium Development Goals (MDGs)*, *Sustainable Development*, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan air bersih, sanitasi, dan infrastruktur dasar.¹¹⁷

Dari kelima tahap perencanaan desa tersebut barulah dapat dirumuskan apa saja yang dibutuhkan dan dibangun di desa untuk menunjang kegiatan masyarakat Desa Candimas.

Dana yang bersumber dari Dana Alokasi Desa (ADD) dikeluarkan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang ada pada Desa Candimas. Dari besaran dana yang diperoleh yaitu sebesar **Rp. 747.233.895**. Dari 70% dana yang di alokasikan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur, maka dapat dilihat bagaimana kualitas kerja aparatur desa dapat mengoptimalkan pembangunan infrastruktur pada Desa Candimas pada tahun 2016. pengoptimalan pembangunan infrastruktur haruslah melihat bagaimana manfaat, kegunaan/fungsi, efektif dan efisien dari pembangunan yang dilakukan.

Pada Desa Candimas di lakukan Pembangunan infrastruktur antara lain, sumur bor, talut penahan tanah, drainase, gorong-gorong, rabat beton, dan jalan lapen. Dari keenam jenis pembangunan yang dilakukan dapat dilihat bagaimana pengopimalan dalam pembangunan yang dilakukan sebagai berikut:

¹¹⁷ Lihat Bab II, h. 265

Tabel 1.5

Data Perbandingan Harga

No.	Jenis Pembangunan	Harga Pembangunan Infrastruktur Pada Desa Candimas	Harga Pasaran Pembangunan Per Unit/Meter	Jumlah
1.	Sumur bor	Rp. 146.693.500	Rp. 14.250.000 x 6 unit	Rp. 85.500.000
2.	Talut penahan tanah	Rp. 130.000.000	Rp. 349.987,5 x 336 m	Rp. 128.095.425
3.	Drainase	Rp. 168.000.000	Rp. 210.000 x 791 m	Rp. 166.110.000
4.	Goron-gorong	Rp. 8.300.000	Rp. 3.775.000 x 2 unit	Rp. 7.550.000
5.	Rabat beton	Rp. 158.200.000	Rp. 900.000 x 171 m	Rp. 153.900.000
6.	Jalan lapen	Rp. 56.000.000	Rp. 56.000.000 x 800 m	Rp. 56.000.000
Jumlah		Rp. 667.193.500		Rp. 447.656.425

Dari tabel diatas dapat dilihat pengoptimalan anggaran biaya yang digunakan pada pembangunan infrastruktur dengan melihat harga pasaran yang ada dengan menggunakan kualitas sedang. berikut penjelasannya :

1. Pembuatan sumur bor sebesar Rp. 146.693.500, dana yang dianggarkan tersebut sangatlah besar apabila hanya membuat 6 titik sumur bor, yang seharusnya dengan menggunakan anggaran dana sebesar Rp. 146.693.500 dapat membuat lebih dari 6 titik sumur bor. Melihat dari harga pasaran yang ada di Lampung dengan pembuatan harga sumur bor dengan 6 titik hanya mengeluarkan dana sebesar Rp. Rp. 85.500.000. Terlihat terdapat pemborosan dan tidak terlihat pengoptimalan pembangunan menggunakan dana dalam penganggaran yang dilakukan oleh aparaturnya desa sehingga mengakibatkan pengeluaran yang seharusnya dapat dialihkan pada pembangunan yang lain.

2. Pembuatan TPT (talut penahan tanah) sepanjang 366 meter dengan menggunakan dana sebesar Rp. 130.000.000, melihat dari harga pasaran yang ada di lampung dengan panjang yang sama hanya dengan menggunakan dana sebesar Rp. 128.095.425, Terlihat terdapat pemborosan dan tidak terlihat pengoptimalan pembangunan menggunakan dana dalam penganggaran yang dilakukan oleh aparaturnya. Pembuatan TPT pada lokasi tersebut karena tidak ada dan dirasa perlu ada talut penahan tanah pada bagian jalan untuk membuat kondisi jalan lebih dapat bertahan lama karena tanah yang ada tidak tergerus air dikala hujan. Pengoptimalan pembangunan TPT saat ini telah sesuai dengan kondisi di desa.
3. Pembuatan drainase (siring pasang) sebesar Rp. 168.000.000 sepanjang 791 meter, melihat dari harga pasaran yang ada di lampung dengan panjang yang sama hanya dengan menggunakan dana sebesar Rp. 166.110.000. Terlihat terdapat pemborosan dan tidak terlihat pengoptimalan pembangunan menggunakan dana dalam penganggaran yang dilakukan oleh aparaturnya.
4. Pembuatan gorong-gorong plat sebanyak 2 buah dengan menggunakan dana sebesar Rp. 8.300.000, melihat dari harga pasaran yang ada di lampung dengan 2 buah gorong-gorong dengan ukuran yang sama hanya dengan menggunakan dana sebesar Rp. 7.550.000 Terlihat terdapat pemborosan dan tidak terlihat pengoptimalan

pembangunan menggunakan dana dalam penganggaran yang dilakukan oleh aparaturnya desa.

5. Pembuatan rabat beton (jalan cor) dengan panjang 171 meter dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 158.200.000, melihat dari harga pasaran yang ada di Lampung dengan panjang yang sama hanya dengan menggunakan dana sebesar Rp. 153.900.000. Terlihat terdapat pemborosan dan tidak terlihat pengoptimalan pembangunan menggunakan dana dalam penganggaran yang dilakukan oleh aparaturnya desa.
6. Pembangunan jalan lapen sepanjang 800 meter dengan menggunakan anggaran dana sebesar Rp. 56.000.000, melihat dari harga pasaran yang ada di Lampung dengan panjang yang sama hanya dengan menggunakan dana sebesar Rp. 56.000.000. Terlihat optimalnya dana yang di gunakan oleh aparaturnya desa dalam pembuatan jalan lapen dengan harga pasaran yang ada. Pembangunan jalan yang dilakukan dibangun pada semua jalan yang mengalami kondisi kerusakan di Desa Candimas.

Dari penjelasan tersebut, dari keenam program yang dilakukan hanya satu program saja yang penganggaran biayanya sama dengan anggaran biaya yang perhitungannya mengikut anggaran biaya pasaran yang ada di

lampung. Hal ini seharusnya tidak terjadi apabila peran dan kontribusi masyarakat ikut dilibatkan dalam pengerjaan pembangunan infrastruktur baik dalam segi perencanaan, pelaksanaan maupun dalam bentuk pengawasan. Transparansi aparatur desa dapat terlihat jika adanya pihak masyarakat yang terlibat, karena mengingat dana yang digunakan merupakan alokasi dana desa yang diperuntukkan untuk pembangunan desa dengan mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pengerjaannya.

Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan bersama dalam melakukan pengoptimalan dalam segi anggaran dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tidak berdayanya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa membuat masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa. Hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa adalah prinsip partisipasi yang merupakan jalan menuju optimalnya pembangunan desa. Bentuk partisipasi bukan hanya saja dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan saja melainkan sampai pada tahap evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat sejak awal, maka diharapkan seluruh dana untuk pengelolaan desa dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan keinginan para aparatur desa saja. Dengan demikian, hak masyarakat desa dapat terpenuhi dengan sendirinya akan tumbuh rasa keswadayaan dan memiliki dari segenap masyarakat dalam upaya pembangunan desa merupakan bentuk implementasi dari alokasi dana desa itu sendiri.

B. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Pembangunan Infrastruktur Desa Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Candimas Kabupaten Lampung Utara

Infrastruktur kembali menjadi prioritas dalam pembangunan secara nasional. Dalam melakukan pembangunan sarana dan prasarana infrastrukturnya berdasarkan teori Grigg sistem infrastruktur merupakan pendukung utama sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.¹¹⁸

Definisi Infrastruktur menurut Grigg adalah sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas public lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun ekonomi.

Pada pembangunan infrastruktur desa merupakan suatu proses pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana yang di miliki. Dalam pembangunan infrastruktur desa perlu adanya tahap perencanaan pembangunan desa, secara garis besar perencanaan desa mengandung pengertian yaitu serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat setempat.

Pembangunan infrastruktur desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi

¹¹⁸ Dwi supatmi, "Sinergi Dan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)", Diakses Pada Kamis, 16 Maret 2017.

karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur desa harus dilihat dalam konteks pembangunan daerah. Hal itu tidak berarti menggugat atau memperlemah upaya otonomi desa tetapi justru memperkuat posisi tawar dan percepatan pembangunan di desa yang bersangkutan.

Dengan adanya pembangunan infrastruktur desa seperti pembuatan sumur bor, pembuatan talut penahan tanah, pembuatan drainase, pembuatan gorong-gorong, pembuatan jalan lapen, dan pembuatan rabat beton, merupakan wujud dari pembangunan yang berkesinambungan. Dimana adanya pembangunan infrastruktur merupakan perubahan yang dilakukan menuju kearah yang lebih baik yang berasal dari orang-orang yang senantiasa berfikir untuk kemajuan. Dengan adanya pembangunan yang dilakukan akan berdampak pada perekonomian masyarakat baik masyarakat yang menjadi pekerja dalam pembangunan infrastruktur maupun para pengguna atau para masyarakat yang memanfaatkan adanya pembangunan dan perbaikan dari sarana dan prasarana yang dilakukan.

Adanya pembangunan Infrastruktur dalam Islam memiliki dampak yang positif dan kemaslhatan dalam segi ekonomi maupun sosial. Adanya pembangunan infrastruktur desa yang berdampak pada perekonomian masyarakat desa baik dalam segi melakukan pekerjaan dan berdagang dapat meningkatkan pendapatan para masyarakat. Dalam ekonomi islam motif

dalam aktifitas ekonomi adalah beribadah. motif beribadah inilah yang kemudian mempengaruhi segala perilaku aktifitas dalam melakukan konsumsi, produksi, dan interaksi ekonomi lainnya.

Apabila masyarakat merasakan dampak dari pembangunan infrastruktur yang membuat perekonomian masyarakat menjadi meningkat, artinya pembangunan infrastruktur tersebut mengalami dampak yang positif. pembangunan infrastruktur yang berdampak pada perekonomian masyarakat akan menjadikan masyarakat yang sejahtera, dalam ekonomi islam kesejahteraan merupakan adanya rasa aman baik dari segi perasaan, lingkungan dan juga materi. Islam memandang Kesejahteraan yang diperoleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan merupakan balas jasa atas usaha yang dilakukan. Dalam hasil wawancara kepada salah satu warga Desa Candis Bapak Yusuf mengatakan kemudahan akses dan perbaikan sarana dan sarana memang telah diperbaiki dan dibangun tetapi memberdayakan masyarakatnya yang tidak nampak dalam pembangunan infrasruktur sehingga perekonomian masyarakat tidak sepenuhnya menjadi sejahtera atau diberdayakan. Seperti dalam Surat Al-Qashash ayat 77 yang menjelaskan:

وَأَبْتَعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain)

*sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*¹¹⁹

Berdasarkan ayat tersebut kandungan yang sangat jelas bahwa kewajiban seorang muslim dan manusia untuk selalu berusaha sekuat tenaga dan fikiran untuk memperoleh harta dan mencari harta tersebut dengan bersungguh-sungguh sesuai dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT.

Manusia berkewajiban untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam menggunakan kemampuan yang dimilikinya dalam mencari, menggunakan dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di muka bumi, karena dalam ayat Al-Qashash telah disebutkan Allah tidak merubah suatu kaum melainkan hambanya yang merubah. Artinya Allah telah membukakkan jalan untuk masyarakatnya dalam menggunakan potensi dan kemampuannya dalam pemberdayaan, tergantung kepada masyarakatnya dapat menggunakan program yang telah ada atau tidak.



¹¹⁹ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahnya Q.S: Al-Qashash (28) ayat 77, PT Syaamil Cipta Media, Bandung, 2005, h. 623.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan dilakukannya pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian, maka sebagai penutup penulis akan memberikan kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi optimalisasi pembangunan infrastruktur Desa melalui program pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan Infrastruktur Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara yang telah dilakukan penulis menyimpulkan bahwa kurang optimalisasi. Hal ini di lihat dari keenam program pembangunan yang dilakukan terdapat satu program saja yang berjalan optimal yaitu program pembuatan jalan lapen. Sedangkan lima program seperti pembuatan sumur bor, talut penahan tanah, drainase, gorong-gorong dan rabat beton tidak optimal dikarenakan anggaran biaya yang di keluarkan oleh apatur desa dengan harga menurut lkkp sangat jauh selisih biaya yang di anggarkan. Selain itu, dalam segi tempat pembangunan yang dilakukan, penganggaran biaya yg tidak efisien, dan tidak adanya peran dan kontribusi masyarakat Dalam kegiatan pembangunan infrastruktur baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Hal ini merupakan ketidak mampuan aparaturnya desa

dalam melaksanakan dan mengelola pemerintahan dalam desa pada kegiatan pembangunan infrastruktur yang menjadi program pemerintah daerah. Dari ketiga faktor yang terjadi yaitu tidak tepat dalam melakukan pembangunan infrastruktur, dalam pengelolaan anggaran dana desa, dan tidak ada pemberdayaan masyarakat dalam program ADD yang menjadi masalah dalam pengoptimalan pembangunan infrastruktur Desa Candimas. Apabila di lakukannya ketiga hal tersebut maka aparatura Desa Candimas dapat menjadikan Desa Candimas berswadaya masyarakat, yang dapat memberi kesempatan kerja pada warganya yang memiliki kemampuan dan keahlian dengan begitu akan mengubah taraf hidup waganya secara berkelanjutan, serta berhasilnya dalam melakukan pembangunan infrastruktur melalui tanggung jawab dan rasa gorong royong antar warga masyarakat Desa Candimas.

2. Pandangan ekonomi Islam tentang pembangunan infrastruktur desa terhadap perekonomian masyarakat. Pembangunan Infrastruktur yang dilakukan di desa candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara memberikan dampak yang Positif karena memberikan *kemaslahatan* bagi masyarakat setempat baik dari aspek ekonomi maupun aspek sosial. Pembangunan infrastruktur yang dikatakan memberikan *kemaslahatan* apabila masyarakat merasakan merasakan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Sebagian masyarakat seperti para pekerja kantor, swasta, pedagang, dan lainnya memang merasa dampak positif dari pembangunan infrastruktur karena mereka lebih

mudah menggunakan akses jalan dalam melintasinya untuk bekerja. Sedangkan untuk masyarakat yang memiliki potensi dan kemampuan dalam pembangunan yang tidak dilibatkan merasakan dirugikan karena tidak dapat terlibat dalam pembangunan desa, selain itu juga mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang harusnya menjadi pekerjaan mereka.

B. Saran

Berdasarkan informasi yang telah didapat oleh penulis, maka penulis hendak memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait dengan tujuan memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan, yaitu:

1. Untuk aparatur Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, dalam pengoptimalan pembangunan infrastruktur aparatur desa harus melihat dari tiga segi yaitu jenis pembangunan yang akan dilakukan, efisiensi anggaran, dan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan desa demi mendapatkan *kemaslahatan* baik pada aparatur desa maupun pada masyarakat.
2. Untuk aparatur Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, aparatur desa yang memiliki wewenang tentang penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dapat melihat potensi, keahlian, serta kemampuan yang dimiliki oleh warga Desa Candimas, hal ini perlu ditinjau agar dalam pemberdayaan masyarakat dapat tepat sasaran dan tidak menggunakan tenaga proyek ataupun masyarakat desa lain. Selain itu juga dengan adanya keterbukaan dan komunikasi yang

baik maka apa yang diinginkan masyarakat untuk kemajuan desa dapat tersampaikan ke pada pihak aparaturnya.

3. Untuk aparaturnya dan masyarakat Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, Perlu adanya komunikasi dan musyawarah yang baik dalam kerjasama dengan masyarakat, karena dengan komunikasi dan musyawarah yang baik dapat membawa keterbukaan, dan kemajuan desa candimas.



DAFTAR PUSTAKA

- A, Mahendra, *Pendekatan dan Pembangunan Strategi Masyarakat di Indonesia*, Jurnal, 2010.
- Adianto Dan Dkk, *Strategi Pembangunan Desa Melalui Program Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Logas Tanah Daratan Kabupaten Kuantas Singingi*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan, Vol 4, No 1, Januari-Juni 2013.
- Agustina, Mira, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Islam Melalui Praktek Kerjasama Musaqoh*, skripsi Program Strata 1 IAIN, Lampung, 2012.
- Alwi, Hasan dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depertemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2002.
- Ariesta, Fitri Dwi, *Membangun Desa Melalui Program Pembangunan Infrastruktut Perdesaan (PPIP) Di Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara*, Skripsi Program Strata 1 IAIN, Lampung, 2014.
- Arikunto, Suharini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Metodelogi penelitian*, Bina Aksara, Yogyakarta: 2006.
- Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahnya, PT. Syaamil Cipta Media, Bandung, 2005.
- Echols John M, dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1990.
- Huda, Nurul, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Irawan, Prasetya, *Logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta: STIA-LAN, 1998.
- Kementrian Desa, *Pembangunan Daerah Ertinggal Dan Transmigasi Republik Indonesia, Membangun Sarana Dan Prasarana Desa*, 2015.
- Korten, D.C. dan Sjahrir, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988.
- Lakitan, Benyamin, dkk, *Metodologi Penelitian*, Indralaya: Universitas Sriwijaya, 1998.

- Mohammad, Nur Sahida dkk, “ *Pembangunan Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Awalan*”, Jurnal Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke VIII, ISSN: 2231-962X, 2013.
- Mutthoriq dkk, Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 2, No 3.
- Nurman, *Srtategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Pujoalwanto, Basuki, *Perekonomian Indonesia*, Tinjauan Histors, Teoritis, Dan Empiris, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka , 2007.
- Rochaety, Eti dan Ratih Tresnati, *kamus Istilah Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Rosnawati, “Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kab. Way Kanan Dalam Perspektif Islam”, Skripsi Program Strata 1 IAIN, Lampung, 2015.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian (dalam teori dan praktek)*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya (cetakan kelima), 2006.
- Subgyo, Joko, *Metode Penelitian (dalam teori dan praktek)*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya (cetakan kedelapan), 2011.
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: CV Alfa Beta, 1998.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*, Bandung: alfabet, 2014.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Solihin, Ismail, *Manajemen Startegi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Sutrisno, Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: UGM, 2002.
- Suwarno, Jhonatan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Tahmid, Khairudin, *Demokrasi Dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Desa*,
Bandar Lampung: Aneka Printing Metro, 2009.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa.

